



LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2004

**KETIMPANGAN GENDER DALAM SEKTOR PENDIDIKAN
DI JAWA TIMUR: KAJIAN DESKRIPTIF EKONOMI
DEMOGRAFIS PASCA KRISIS**

Peneliti:

Drs.Ec. Tri Haryanto, MP.
Dra.Ec.Hj. Siti Umajah Masjkuri

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2004

S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 4223/J03/PP/2004

Tanggal 7 Juni 2004

Nomor Urut: 53

PUSLIT PEMBANGUNAN REGIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2004

- WOMEN IN DEVELOPMENT
- EDUCATION - DEMOGRAPHIC ASPECTS



LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2004

LP. 112/06

Har
K

KETIMPANGAN GENDER DALAM SEKTOR PENDIDIKAN DI JAWA TIMUR: KAJIAN DESKRIPTIF EKONOMI DEMOGRAFIS PASCA KRISIS

Peneliti:

Drs.Ec. Tri Haryanto, MP.

Dra.Ec.Hj. Siti Umajah Masjkuri

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2004

S.K Rektor Universitas Airlangga Nomor 4223/J03/PP/2004

Tanggal 7 Juni 2004

Nomor Urut: 53

011206141

PUSLIT PEMBANGUNAN REGIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2004



LEMBAGA PENELITIAN

1. Puslit Pembangunan Regional
2. Puslit Obat Tradisional
3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584)
4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720)
6. Puslit/Studi Wanita (5995722)
7. Puslit Olah Raga
8. Puslit Bioenergi
9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995246
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

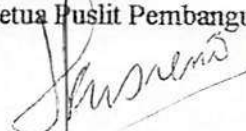
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPOARAN AKHIR HASIL PENELITIAN


1.	Judul penelitian	:	Ketimpangan Gender Dalam Sektor Pendidikan di Jawa Timur : Kajian Deskriptif Ekonomi Demografis Pasca Krisis
	a. Macam Penelitian		<input type="checkbox"/> Fundamental <input type="checkbox"/> Terapan <input type="checkbox"/> Pengembangan
	b. Kategori penelitian		<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III
2.	Kepala Proyek Penelitian		
	a. Nama lengkap dg. Gelar	:	Drs. Ec. Tri Haryanto, MP.
	b. Jenis kelamin	:	Laki-laki
	c. Pangkat/Golongan/NIP	:	Asisten Ahli/IIIc/132 056 927
	d. Jabatan fungsional	:	Dosen Tetap/Lektor
	e. Fakultas / Puslit / Jurusan	:	Ekonomi/IESP (Pembangunan Regional)
	f. Univ./ Inst./Akademi / Instansi	:	Universitas Airlangga
	g. Bidang Ilmu yang diteliti	:	Sosial/Kependudukan
3.	Jumlah Tim Peneliti	:	2 (dua) orang
4.	Lokasi Penelitian	:	Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
5.	Kerjasama dengan Instansi Lain:		
	a. Nama Instansi	:	--
	b. Alamat	:	--
6.	Jangka Waktu Penelitian	:	5 (lima) bulan
7.	Biaya yang diperlukan	:	Rp 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah)
8.	Seminar Hasil Penelitian		
	a. Dilaksanakan Tanggal		
	b. Hasil Penelitian		<input type="checkbox"/> Baik sekali <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Kurang

Surabaya, Nopember 2004

Mengetahui :
Ketua Puslit Pembangunan Regional

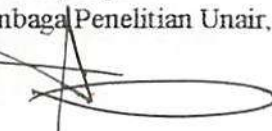
Ketua Peneliti,


Dra. Ec. Hj. Sri Kusreni, MSi.
NIP. 130 541 826


Drs. Ec. Tri Haryanto, MP.
NIP. 132 056 927



Menyetujui :
Ketua Lembaga Penelitian Unair,


Prof. Dr. H. Sarmanu, MS.
NIP. 130 701 125

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

- Judul Penelitian : **KETIMPANGAN GENDER DALAM SEKTOR PENDIDIKAN DI JAWA TIMUR : KAJIAN DESKRIPTIF EKONOMI DEMOGRAFIS PASCA KRISIS**
- Ketua Peneliti : Tri Haryanto
Siti Umajah Masjkuri
- Fakultas/Puslit : Pusat Penelitian Pembangunan Regional - Universitas Airlangga
- Tahun : 2004 (69 halaman)
-

Isi Ringkasan:

1. Masalah Penelitian:

- (a) Bagaimana kondisi empiris disparitas gender yang terjadi pada aktivitas pendidikan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Jawa Timur?
- (b) Sejauhmana keterlibatan (proporsi) perempuan dalam aspek pendidikan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Jawa Timur?

2. Tujuan Penelitian :

1. mengetahui kondisi serta keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan khususnya pada sektor pendidikan di seluruh daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur.
2. mendapatkan dan menyajikan informasi secara empiris, serta aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya disparitas gender di sektor pendidikan pada daerah yang akan diteliti.
3. memetakan kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terdapat kesenjangan gender di sektor pendidikan mulai dari intensitas terendah hingga yang tertinggi.

3. Metode Penelitian

Lingkup penelitian ini adalah lebih dititikberatkan pada kesenjangan gender antara wilayah di kota dan kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Obyek yang diteliti adalah kondisi ketimpangan gender dalam sektor sektor pendidikan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari: Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional; Laporan Tahunan *United Nations Development Programme* (UNDP) berbagai tahun dan berbagai literatur lain yang mendukung. Pengumpulan data sekunder yang sejenis bersumber dari buku/majalah/jurnal untuk kemudian dilakukan penyuntingan sesuai kebutuhan. Langkah berikutnya adalah pembuatan tabulasi data *cross section* yang kemudian akan diberikan keterangan yang terkait.

Teknik analisis data mempergunakan ulasan atau analisis deskriptif kualitatif dan analisis tabel silang. Dalam tulisan ini analisis lebih banyak dilakukan pada disparitas gender pada sektor pendidikan antar daerah (kabupaten/kota). Karenanya dalam penelitian ini peneliti tidak mempergunakan hipotesis sebagai pijakan dalam memperdalam penelitian ini, sehingga model analisis kuantitatif statistik maupun ekonometrik juga tidak akan dilibatkan. Oleh sebab itu analisis kualitatif lebih ditekankan dalam pembahasan nanti.

4. Hasil dan Kesimpulan

A. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

(i) Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka terdapat jumlah kelulusan laki-laki lebih banyak dibanding perempuan pada semua kabupaten dan di sebagian besar kota-kota di Jawa Timur. (ii) Pendidikan tertinggi yang ditamatkan masyarakat Jawa Timur pada kurun waktu 1998 hingga 2002 sebagian besar adalah "Sekolah Dasar", yakni berkisar antara 33 – 34% untuk laki-laki dan 28 – 31% untuk perempuan. (iii) Persentase laki-laki yang melanjutkan pendidikan dari SLTP ke SLTA menunjukkan kecenderungan selalu meningkat, kecuali dari tahun 2001 ke 2002. Sebaliknya persentase perempuan yang melanjutkan pendidikan dari jenjang SLTP ke SLTA justru terjadi penurunan dari tahun 1998 sampai dengan 2002. (iv) Wilayah "Tapal Kuda" mengalami kesenjangan gender cukup besar terdapat pada Kabupaten Sumenep, Bondowoso dan Situbondo yakni sebesar 19,40%, 17,64%, dan 15,45%. Wilayah "Mataraman"

terdapat pada Kabupaten Ngawi, Ponorogo dan Pacitan masing-masing 15,04%, 13,46% dan 12,32%. Wilayah “Gerbangkertosusila” reratif tidak mengalami perbedaan yang cukup mencolok.

B. Melek Huruf Orang Dewasa

- (a) Secara umum laki-laki sebesar 89,65% dan perempuan sebesar 76,81%. Dalam 5 tahun terakhir diikuti oleh penurunan angka buta huruf, sehingga pada tahun 2002 angka melek huruf menjadi 90,51% untuk laki-laki dan 79,47% untuk perempuan.
- (b) Wilayah “*tapal kuda*” memiliki disparitas gender yang relatif cukup tinggi, yakni Kabupaten Bondowoso (18,87%); Situbondo (18,43%); Sumenep (17,91%); Jember (16,21%); Sampang (15,95%); Bangkalan (15,82%); Kabupaten Probolinggo (15,48%). Adapun tiga wilayah yang terdapat disparitas gender terendah adalah Kabupaten Sidoarjo (3,97%); Kota Surabaya (4,26%), dan Kota Malang (5,56%).
- (c) Menurunnya ABH mencerminkan keberhasilan sejak adanya SD Inpres pada sekitar 1970-an dan Gerakan Wajib Belajar (1984). ABH penduduk usia 10 tahun pada tahun 2002 terdapat daerah yang mencapai lebih dari 30% yakni Kabupaten Situbondo (30,01%), Bondowoso (34,26%) dan ABH tertinggi di Kabupaten Sampang yaitu 41,46%. Untuk ABH cukup rendah (kurang dari 10%) ada sebanyak 10 daerah, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Gresik serta seluruh Kota yang ada (7 Kota).

C. Partisipasi sekolah

(a) Angka Partisipasi Usia SD

(i) Perkembangan APS perempuan lebih cepat daripada APS anak laki-laki dalam kurun 1998-2002. (ii) APS usia SD untuk kabupaten/kota pada tahun 2002 terdapat 4 kabupaten/kota yang sudah mendekati 100% yaitu: Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Blitar dan Kota Mojokerto. APS usia SD kurang dari 95% sebanyak 5 kabupaten, yaitu: Kabupaten Jember, Situbondo, Sumenep, Pamekasan dan yang terendah adalah Kabupaten Sampang.

(b) Angka Partisipasi Usia SLTP

(i) Tahun 1998 dan 2001 persenttase anak laki-laki yang belum/tidak pernah sekolah lebih rendah dibanding perempuan, tetapi mulai tahun 2001 yang terjadi adalah kebalikannya, persentase laki-laki yang belum/tidak pernah sekolah lebih tinggi dibanding perempuan. (ii) Anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi, selama tahun 1998-2002 menunjukkan pola huruf "U". Namun sebenarnya menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Tahun 1998 persentase anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi sebesar 21,02% kemudian turun menjadi 17,20% pada tahun 2002. (iii) Secara umum perkembangan angka putus sekolah dalam lima tahun terakhir tampak pola seperti "U" yaitu cenderung semakin menurun selama tahun 1998-2001 dan sedikit meningkat pada tahun 2002.

(c) Angka Partisipasi Usia SLTA

(i) Tingkat kesenjangan gender usia SLTA menunjukkan kecenderungan semakin menurun walaupun tidak secepat usia SD dan SLTP. Pada tahun 1998 tingkat kesenjangan antara APS laki-laki dan perempuan sebesar 5,6% selanjutnya pada tahun 2002 menurun menjadi 4,42%. (ii) Untuk usia SLTA yang tidak bersekolah lagi, tampak bahwa selama tahun 1998-2002 menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Sejak tahun 1998 sampai dengan 2002 laki-laki yang tidak bersekolah lagi lebih tinggi dibanding perempuan.

SUMMARY

Gender Disparity of Education Sector in East Java: The Post Crisis Demographic Economics Descriptive Study

The gender disparity phenomenon on education sector always becomes a public debate until now. In fact, gender disparity of education occurs, not only in terms of occupation by sector but also occurs in terms of regional aspects in East Java Province.

The aims of this research are to identify gender disparity in interregional development in East Java Province and to get and present empirically the factors that cause the gender disparity in the research field; and to perceive the regions that dominate the contrast gender disparity. The objects of this research is all of the regency and municipality in East Java. The research's focus are the circumstance of gender disparity in education sector.

The data is obtained from the book of Population characteristics of Jawa Timur (Result of The 2000 Population Census); The result of National Socio-Economic Survey of East Java Province 2001; Indonesia Human Development Report 2001 (Toward a new consensus).

The technical of analysis uses descriptive-qualitative and cross-tabulation approaches. The hypothesis is not used in the research and neither the quantitative-statistic or econometric approach. So, this research highly depends on qualitative approach.

The research finds that female have seen an increase in opportunities, but the education attainment of male higher than female, exceptionally "Not yet completed Primary School" and "Primary school". The regions which are belonged to this category are Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo (regency), Sumenep, Pamekasan, Sampang.

Generally, the adult literacy rate of male in the "Tapal Kuda" region like Bondowoso, Situbondo, Sumenep, Jember, Sampang, Bangkalan, and Probolinggo (regency) have gender disparity level highest among another region. In other hand Sidoarjo (regency); Surabaya and Malang (municipally) are the region that have gender disparity level lower.

The female enrollment rate of elementary school growth faster than male for period 1998-2002. So, enrollment rate of junior high school male higher than female. However the school drop-out rate have decrease for along 1998 to 2001 dan grow up in 2002, like "U" shape. But gender disparity of enrollment rate of senior high school sloping downward.

KATA PENGANTAR

Dengan hanya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Yang maha . Kuasa dan dengan atas perkenan-Nya laporan akhir "Ketimpangan Gender Dalam Sektor Pendidikan di Jawa Timur : Kajian Deskriptif Ekonomi Demografis Pasca Krisis" akhirnya dapat terselesaikan.

Harapan kami semoga laporan akhir ini akan mampu memberikan kontribusi pemikiran serta landasan berpijak bagi penyusunan program-program pembangunan agar senantiasa lebih mempertimbangkan peran perempuan dalam pembangunan baik oleh dunia usaha maupun oleh pemerintah.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta pelayanan sehingga studi ini terlaksana khususnya Ketua Pusat Penelitian Pembangunan Regional yang telah memberikan fasilitas kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, Nopember 2004

Ketua Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Sistematika Tulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Pendahuluan	8
2.2. Gender Sebagai Sebuah Perspektif	10
2.3. Gender Dalam Perspektif Islam	11
2.4. Gender Dalam Pembangunan	12
2.5. Teori Karl Marx Tentang Nilai Feminisme	13
2.6. Teori Konflik	13
2.7. Ilmu Ekonomi Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi	15
2.8. Permintaan dan Penawaran Pendidikan	16
2.9. Teori Krendensialisme	19
2.10. Gender-related Development Index	21
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	22
3.1. Tujuan Penelitian	22
3.2. Manfaat Penelitian	22

BAB IV	METODE PENELITIAN	23
	4.1. Ruang Lingkup Penelitian	23
	4.2. Jenis dan Sumber Data	23
	4.3. Teknik Pengumpulan Data	24
	4.4. Teknik Analisis	24
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	25
	5.1. Kondisi Geografis dan Demografis Propinsi Jawa Timur	25
	5.2. Gambaran Umum Pendidikan di Jawa Timur	30
	5.2.1 Penduduk Usia Sekolah dan Partisipasi Sekolah	31
	5.2.2 Partisipasi Sekolah	32
	5.2.3 Angka Buta Huruf	35
	5.2.4 Rata-rata Tingkat Pendidikan	38
	5.2.5 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	38
	5.3. Disparitas Gender Pada Sektor Pendidikan di Jawa Timur	40
	5.3.1 Kesenjangan Gender: Wanita Dalam Pendidikan	40
	5.3.2 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	41
	5.3.3 Melek Huruf Orang Dewasa	49
	5.3.4 Partisipasi Sekolah	54
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	65
	6.1. Kesimpulan	65
	6.2. Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN	--

JUDUL TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 5.1.	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur Menurut Tempat Tinggal Tahun 1971 - 2000	28
Tabel 5.1.	Jenjang Sekolah Berdasarkan Kelompok Umur	30
Tabel 5.2.	Jumlah Penduduk Jawa Timur Pada Usia Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 1998 -2002	31
Tabel 5.3.	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1998 – 2002	32
Tabel 5.4.	Angka Buta Huruf dan Angka Melek Huruf Umur 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur Tahun 1998 – 2002	36
Tabel 5.5	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Propinsi Jawa Timur 1998 – 2002 (%)	39
Tabel 5.5.	Kesenjangan Pendidikan Antargender: Rasio Partisipasi Pelajar Wanita Terhadap Pria	40
Tabel 5.6	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kelamin di Jawa Timur Tahun 1998-2002	42
Tabel 5.7.	Proporsi Penduduk Laki-laki dan Penduduk Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2000	44

Tabel 5.8.	Angka Buta Huruf dan Angka Melek Huruf Umur 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Timur Tahun 1998 – 2002	50
Tabel 5.9.	Prosentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Baca Tulis Tahun 2001	53
Tabel 5.10.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah SD, SLTP, dan SLTA sederajat di Jawa Timur Tahun 1998-2002 (%)	55
Tabel 5.11.	Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Jawa Timur Tahun 1998-2002	56
Tabel 5.12.	Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Jawa Timur Tahun 1998-2002	58
Tabel 5.13.	Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Jawa Timur Tahun 1998-2002	60
Tabel 5.14.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas dan Partisipasi Sekolah Tahun 2001	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran
1	Kepadatan Penduduk Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1997-2002
2	Angka Buta Huruf Umur 10 Tahun ke Atas di Jawa Timur (%) Tahun 1998-2002
3	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Tahun) Tahun 1998 - 2002
4	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Tamat SD Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Tahun) 1998-2002
5	Prosentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas dan Partisipasi Sekolah Tahun 2001
6	Persentase Penduduk Laki-laki Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan Tahun 2002
7	Persentase Penduduk Perempuan Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan Tahun 2002
8	Kesenjangan Pendidikan Laki-laki dan Perempuan Penduduk Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan Tahun 2002
9	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 1998-2002
10	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 1998-2002
11	Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 1998-2002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rendahnya kualitas hidup perempuan akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia secara keseluruhan utamanya di bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hal ini pada akhirnya akan berdampak secara negatif terhadap proses pembangunan bangsa yang sedang berjalan. Bukan hanya itu, dengan kualitas yang rendah, maka perempuan akan menjadi beban pembangunan dan merupakan potensi yang tersia-sia. Oleh karena itu, perlunya upaya “peningkatan kualitas hidup perempuan” agar menjadi aset nasional pembangunan yang potensial, dan yang mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap proses pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan.

Sementara itu, pembangunan pemberdayaan perempuan khususnya di bidang pendidikan, diharapkan dapat menaikkan posisi Indonesia dalam urutan *Human Development Index* yang angkanya terus menurun sejak tahun 1998. Hal ini diharapkan akan meningkatkan pencapaian target dan sasaran *Millennium Development Goals* – MDG dari *United Nation Development Programme*. Salah satu target tersebut adalah tercapainya pendidikan dasar secara universal dan promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang ditandai dengan hilangnya kesenjangan gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2015 serta meningkatnya angka melek huruf perempuan pada kelompok usia 15-24 tahun (www.menegpp.go.id).

Namun bila disimak lebih mendalam, ternyata jumlah penduduk perempuan Indonesia hampir separuh (49,9 persen menurut SP.2000), ternyata masih mengalami efek diskriminasi gender. Dari sekian diskriminasi gender tersebut salah satunya terdapat dalam bidang pendidikan. Keadaan itu ditandai dengan adanya perbedaan kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan

dalam sistim pendidikan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Efek diskriminasi gender ini, lebih disebabkan nilai-nilai sosial budaya patriarki yang cenderung masih dianut oleh sebagian besar masyarakat. Kondisi seperti ini dalam banyak hal masih terlegitimasi dalam kebijakan program, aturan perundangan, mekanisme dan prosedur-prosedur baku, baik langsung maupun tidak langsung terinternalisasi dalam dunia pendidikan. Salah satu efek diskriminasi gender ini adalah perbedaan kesempatan secara konsisten pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Kondisi ini akan menjadi faktor penyebab perbedaan produktivitas antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari perbedaan rata-rata penghasilan perempuan dan laki-laki.

Menurut sumber pada Kementerian Negara Pemberdayaan Wanita dikatakan bahwa hasil Susenas 2000 menunjukkan penduduk perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan SLTP ke atas baru mencapai 36,9 persen sedangkan laki-laki telah mencapai 46,0 persen. Penduduk perempuan yang berpendidikan tinggi baru sekitar 3,06 persen dibandingkan dengan laki-laki yang telah mencapai 4,17 persen. Sampai tahun 2001 belum ada perubahan berarti, bagi penduduk perempuan yang belum melek huruf dari angka 14,46 persen pada tahun 1998, hanya menjadi sekitar 14,06 persen pada tahun 2001. Di daerah perdesaan kondisi ini lebih parah lagi, perempuan desa yang belum melek huruf masih sebesar 19,20 persen dibandingkan laki-laki sebesar 9,63 persen, hampir mendekati perbandingan 1 di antara 3 (Susenas, 2000).

Pada jenjang pendidikan SD, SLTP dan SMU, nampaknya kesempatan memperoleh pendidikan untuk perempuan dan laki-laki telah seimbang bahkan relatif lebih tinggi pada perempuan, hal ini nampak pada angka partisipasi murni (APM). Pada tahun 2000 untuk SD, APM perempuan 92,6 persen berbanding laki-laki 92 persen, untuk SLTP APM perempuan 60,7 persen berbanding laki-laki 58,6 persen, pada SMU APM perempuan 38,9 persen berbanding laki-laki 36,7 persen, sedangkan di Perguruan Tinggi APM perempuan masih lebih kecil yaitu sekitar 8,9 persen dibandingkan laki-laki sebesar 10,9 persen.

Keadaan ini secara langsung maupun tidak langsung merupakan dampak dari adanya krisis ekonomi yang telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin

semakin bertambah. Hingga tahun 2000 jumlah penduduk miskin di Indonesia ada 37,5 juta orang (Susenas, 2000). Adalah penduduk perempuan dan anak-anak merupakan bagian penduduk yang paling terasa dari dampak kemiskinan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan turunnya daya beli keluarga sehingga lebih membebani perempuan dalam pengelolaan rumah tangga dan pemeliharaan pendidikan maupun kesehatan.

Dampak lainnya adalah meningkatnya anak putus sekolah dalam dan antar jenjang pendidikan. Dalam pendidikan, preferensi keluarga masih lebih banyak mendahulukan anak laki-laki untuk melanjutkan pendidikan, sehingga banyak anak perempuan yang putus sekolah, meskipun mempunyai potensi diri yang lebih dibandingkan dengan saudara laki-lakinya. Pada akhir tahun 2000 terdapat 4.016.600 anak putus sekolah dengan rincian SD ada 3,38 persen, lulus SD tidak melanjutkan ke SLTP sebanyak 19,31 persen, putus SLTP sebanyak 4,04 persen, lulus SLTP tidak melanjutkan ke SMU/SMK sebanyak 34,40 persen, putus SMU/SMK ada 2,60 persen, lulus SMU/SMK tidak melanjutkan ke PT terdapat 53,12 persen.

Hal tersebut masih ditambah dengan persoalan pendidikan dan kondisi sosial masyarakat yang memperhatikan, yakni sektor pendidikan masih dihadapkan dengan rendahnya mutu/kualitas, kompetensi guru, rasio jumlah guru dan murid di kelas, pemerataan yang belum dapat diwujudkan, keadaan prasarana dan sarana sekolah yang masih jauh dari tuntutan standar pelayanan minimal (SPM) untuk proses pelaksanaan pendidikan, maka dapatlah diperkirakan kondisi SDM Indonesia di masa yang akan datang, apalagi kondisi SDM perempuannya.

Hal ini terbukti dari laporan UNDP tentang *Human Development Index* tahun 2002 dimana Indonesia menempati urutan ke-110 dari 173 negara. Tahun 2003 Indonesia berada pada urutan ke-112 dari 175 negara. Apabila tidak ditangani secara serius, kualitas SDM yang rendah ini, tentunya akan menghambat pembangunan dan menjadi beban bagi pembangunan itu sendiri.

Di tingkat lokal Jawa Timur sendiri, selama melaksanakan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I, perekonomian Propinsi Jawa Timur telah mencatat keberhasilan dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan nasional

6 – 7 persen. Bahkan sejak awal dekade '90-an pembangunan ekonomi di Propinsi Jawa Timur telah terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder maupun tersier. Hal ini dapat dipahami mengingat peningkatan di sektor primer terutama subsektor pertanian yang menghasilkan *income generating effect* bagi sektor lain. Kondisi ini berdampak minat investor dalam menanamkan modalnya di Jawa Timur khususnya pada sektor industri dan diikuti pula oleh sektor jasa lainnya. Sehingga di masa berikutnya pertumbuhan kedua sektor tersebut melampaui sektor primer.

Namun semenjak krisis yang menggoncangkan sendi-sendi perekonomian khususnya maupun dimensi sosial umumnya bahkan hingga merambah dimensi politik, menjadikan Jawa Timur terpuruk hingga mencapai angka pertumbuhan ekonomi minus 16,22 persen di tahun 1998. Hal ini menjadikan rapor Propinsi Jawa Timur memburuk bukan hanya pada aspek pembangunan ekonominya saja. Lebih dari itu pembangunan manusianya – yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia – menempati peringkat ke-22 dari 26 propinsi pada tahun 1999 (*Indonesia Human Development Report 2001: 78*).

Fenomena krisis ternyata tidak hanya menyebabkan kinerja Jawa Timur terpuruk diantara propinsi-propinsi lainnya di Indonesia. Di lain sisi, akibat dari paradigma pembangunan yang telah lama terpola, menyebabkan di berbagai sendi-sendi kehidupan baik ekonomi, sosial dan budaya, masih menyisakan suatu kondisi perbedaan yang cukup berarti diantara para pelakunya. Kondisi ini tercermin dari adanya perbedaan peran atas kaum laki-laki dan perempuan (baca: disparitas gender). Hal ini tidak saja terjadi pada dimensi ekonomi, pendidikan, sosial, namun juga pada tataran yang lebih struktural baik yang menyangkut individual maupun kelompok yang begitu struktural pada berbagai lapisan masyarakat. Hal senada dikemukakan oleh Mosse:

“Salah satu ideologi paling kuat yang menyokong perbedaan gender adalah pembagian dunia ke dalam wilayah publik dan privat. Wilayah publik yang terdiri atas pranata publik, negara, pemerintahan, pendidikan, media, dunia bisnis, kegiatan perusahaan, perbankan, agama, dan kultur, di hampir semua masyarakat di dunia ini didominasi laki-laki. Yang jelas, ada

perempuan individu yang memasuki dan mungkin pada akhirnya memimpin pranata semacam itu, namun dimana-mana tidak ada perempuan sebagai satu kelompok yang menjalankan kekuasaan dan pengaruh di wilayah publik dalam cara yang sama seperti dilakukan laki-laki. Ini berimplikasi penting terhadap praktik pembangunan dan kemampuan perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak berat sebelah serta menguntungkan perempuan dan laki-laki." (Mosse, 1996 : 106)

Dalam kenyataannya, ternyata isu disparitas gender tidak hanya terjadi antar sektoral, namun juga didapati perbedaan antar wilayah. Dimana tingkat partisipasi perempuan khususnya dalam bidang pendidikan tidaklah sebaik seperti yang dialami laki-laki. Tentunya hal ini semakin membuat kaum perempuan berada pada posisi yang *inferior* untuk memperoleh akses yang lebih baik pada berbagai bidang.

Pada awal '90-an hingga menjelang krisis ekonomi berlangsung peran serta perempuan dalam berbagai sektor secara umum dapat terlihat dalam partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki. Di bidang pendidikan, dengan menggunakan "*rata-rata tahun sekolah*", maka perbandingan perempuan dan laki-laki adalah sebesar 5,3 tahun dan 6,7 tahun ; tingkat melek huruf orang dewasa sebesar 74,5 persen dan 88,6 persen. Tentunya kenyataan ini merupakan potret berbagai aktivitas yang masih begitu banyak didominasi oleh kaum laki-laki.

Sebenarnya komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan gender dilandaskan pada pasal 27 UUD 1945 dan diperkuat melalui ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*) ke dalam UU No. 7/1984, serta Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing hasil Konferensi Dunia tentang Perempuan keempat di Beijing pada tahun 1995. Namun demikian, hal tersebut juga belum dapat menyetarakan kedudukan dan peranan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender sehingga berbagai ketimpangan sebagai akibat dari masalah struktural dan nilai-nilai sosial budaya yang telah lama ada

dan berkembang dalam masyarakat dapat dikurangi. (*Program Pembangunan Nasional /Propenas 2001-2005; Bab V: Membangun Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya*)

Dari uraian di atas tentunya gambaran secara lebih rinci bagaimana kondisi disparitas gender khususnya pada sektor pendidikan yang terjadi diantara kabupaten maupun kota di seluruh propinsi Jawa Timur sangat menarik untuk diteliti. Pada aspek apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas gender tersebut. Sehingga pada akhirnya tantangan, hambatan dan rintangan tersebut akan dapat diminimalkan.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan melihat gambaran di atas maka rumusan permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi empiris disparitas gender yang terjadi pada aktivitas pendidikan, di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Jawa Timur?
2. Sejauhmana keterlibatan (proporsi) perempuan dalam aspek pendidikan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Jawa Timur?

1.3. Sistematika Penulisan

Tulisan ini dirangkai dalam enam bab yang merupakan satu kesatuan dengan rincian sebagai berikut :

Bab I menguraikan secara ringkas tentang latar belakang permasalahan, dan rumusan masalah yang dikemukakan serta sistematika penulisan.

Bab II mencoba menengahkan tentang landasan teoritik yang mendukung pembahasan yang diuraikan dalam bab IV; beberapa pendapat yang dikemukakan oleh berbagai tokoh yang berkompeten; serta dilengkapi dengan kondisi kecenderungan disparitas gender di sektor pendidikan yang telah dikembangkan UNDP dalam beberapa laporan tahun-tahun terakhir.

Bab III. memaparkan tentang tujuan dan manfaat penelitian bagi perkembangan khasanah ilmu dan pentingnya untuk proses pengambilan

kebijakan bagi kalangan yang membutuhkan pada umumnya dan peneliti pada khususnya.

Bab IV akan membahas tentang metode penelitian yang mencakup jenis dan sumber data dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Dalam bab ini juga akan dibahas tentang teknik dan metode analisis data.

Bab V Selanjutnya membahas dan menganalisis keadaan ketimpangan gender di sektor pendidikan penduduk di Jawa Timur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan memanfaatkan data *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 2001 dan 2002 dilihat dari berbagai daerah kota atau kabupaten. Dalam bab ini juga akan menguraikan faktor-faktor yang menjadi penyebab ketimpangan secara gender diantara kota maupun kabupaten di Jawa Timur dan akan dilanjutkan dengan implikasi-implikasi kebijakan pemerintah maupun pelaku ekonomi untuk mempertimbangkan peran serta perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas pembangunan.

Akhirnya seluruh tulisan ini akan ditutup dengan bab VI yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis tentang kondisi disparitas gender khususnya di Propinsi Jawa Timur yang didasarkan data yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Pendahuluan

Kesempatan untuk mengecap pendidikan bagi para wanita muda (remaja dan usia sekolah) dibandingkan dengan kaum pria yang sebaya ternyata sangat tertinggal. Sebanyak 66 dari 108 negara berkembang, jumlah wanita muda yang duduk di bangku sekolah dasar dan menengah selalu lebih kecil, setidaknya 10 persen, daripada jumlah anak laki-laki. **Kesenjangan pendidikan antarjenis kelamin (*educational gender gap*)** tersebut semakin mencolok di negara-negara miskin. Jika gambarnya dilihat per kawasan, maka ketimpangan pendidikan antarjenis kelamin terbesar terdapat di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Di segenap negara berkembang secara keseluruhan, kemampuan baca tulis kaum wanita 29 persen lebih rendah daripada kaum pria; periode tempuh atau tingkat pendidikan rata-rata wanita 45 persen lebih rendah; sedangkan persentase atas jumlah anak-anak perempuan usia sekolah yang benar-benar duduk dibangku sekolah 9 persen (untuk mereka yang dibangku sekolah dasar), 28 persen (sekolah menengah) dan 49 persen (perguruan tinggi) lebih rendah daripada anak laki-laki (Todaro, 2000: 333)

Mengapa soal pendidikan bagi kaum perempuan tersebut begitu penting? Apakah semata-mata hal itu menyakut soal pemerataan? Jawabannya, berdasarkan data-data yang terkumpul, bahwa diskriminasi pendidikan terhadap kaum wanita turut menjadi sebab terhambatnya pembangunan ekonomi, karena hal itu memang memperpuruk ketimpangan kesejahteraan sosial. Karenanya, peningkatan kesempatan bagi kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan, ditinjau dari sudut ekonomi, harus dilaksanakan atas dasar empat alasan sebagai berikut:

1. Hasil pendidikan wanita di negara-negara Dunia Ketiga ternyata lebih besar daripada hasil pendidikan kaum pria.
2. Peningkatan pendidikan kaum wanita tidak hanya akan memacu produktifitas sektor-sektor pertanian maupun industri, tetapi juga akan menurunkan usia

pernikahan, meredakan tingkat fertilitas, serta memperbaiki mutu kesehatan dan nutrisi anak-anak.

3. Peningkatan kualitas kesehatan dan tingkat gizi anak-anak, serta membaiknya pendidikan ibu-ibu mereka, dengan sendirinya akan sangat memperbaiki kualitas sumber daya manusia selama beberapa generasi mendatang.
4. Karena kaum wanitalah yang menanggung beban terbesar dari kemiskinan dan kelangkaan lahan garapan di banyak negara-negara Dunia Ketiga, maka setiap perbaikan peranan dan status ekonomi mereka melalui peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan akan melipatgandakan daya dan kekuatan mereka guna menghancurkan lingkaran setan kemiskinan dan keterbatasan pendidikan.

Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) dikatakan bahwa kesetaraan gender merupakan inti yang menentukan pencapaian *Millenium Development Goal* (MDG), mulai dari peningkatan derajat kesehatan dan memberantas penyakit, sampai ke penghapusan kemiskinan dan kelaparan, memperluas pendidikan. Sementara itu ketidaksetaraan gender masih menghambat keberdayaan perempuan di bidang pendidikan dan kesehatan, meskipun juga tampak ada kemajuan. Antara tahun 1990-2001 misalnya, perbandingan antara perempuan melek huruf dengan laki-laki pada usia 15-24 tahun di negara-negara dengan indeks pembangunan manusia (IPM) *rendah*, meningkat dari 70 menjadi 81 perempuan per 100 laki-laki, meskipun di negara-negara dengan indeks pembangunan manusia *medium* hanya naik dari 91 menjadi 93.

Rasio gender di tingkat pendidikan dasar mengalami perkembangan yang terbatas, yaitu naik dari 86 menjadi 92 anak perempuan per 100 anak laki-laki di negara berkembang antara tahun 1990-2000. Dengan situasi seperti itu, kesetaraan gender di bidang pendidikan baru bisa dicapai pada tahun 2025 atau 20 tahun dari target yang ditentukan MDG.

Tingkat melek huruf pada perempuan usia remaja dan dewasa muda (15-24 tahun) di negara berkembang adalah 60 persen dibandingkan 80 persen pada laki-

laki. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan akan berpengaruh kepada pemahaman mereka mengenai kesehatan, khususnya kesehatan reproduksinya, sehingga memperlemah posisi mereka di dalam hubungan-hubungan dengan orang lain, termasuk pasangannya. Inilah yang menyebabkan semakin banyak perempuan dan ibu rumah tangga terinfeksi HIV/AIDS.

2.2. Gender Sebagai Sebuah Perspektif

Pada dasarnya gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Gender adalah seperangkat peran yang dimainkan sehingga orang lain mengetahui hal itu adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku ini mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya yang secara bersama-sama memoles peran gender (Mosse, 1996 :3).

Adapun Irwan Abdullah (2001) gender merupakan konstruksi sosial atas laki-laki dan perempuan yang menitikberatkan pada "relasi" dan menjadi suatu konsep maupun definisi yang terbangun melalui ruang dan waktu serta terkonstruksi menurut kelas, sosial, politik, maupun budaya. Oleh karena itu konsep gender cenderung mengalami perubahan serta mengikuti konsep *cultural relativism*. Identifikasi yang berubah dan dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan yang demikian ini yang dikenal dengan konsep gender.

Menurut Fakhri (1996: 8-9) konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, dimana kondisi serta sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan dan berubah yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat serta suatu kelas yang berbeda. Dengan demikian semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki itulah yang dikenal dengan konsep gender. Sedangkan jenis kelamin (*sex*) merupakan pensifatan manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan dan seringkali hal tersebut dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau *kodrat*.

2.3. Gender Dalam Sejarah Islam

Islam datang untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar terhadap praktik kehidupan Jahiliyah yang mendiskriminatif perempuan. Rasulullah Muhammad S.A.W. sebagai nabi terakhir secara makro berupaya mengangkat martabat manusia dengan misi rahmatan lil alamin, secara khusus melakukan pembelaan terhadap hak-hak perempuan yang dalam periode saat itu dan sebelumnya tidak pernah diperolehnya. Oleh beberapa feminis muslim, beliau dipandang sebagai feminis pertama dalam Islam (Mufidah, 2003: 36).

Secara epistemologis, proses pembentukan kesetaraan gender yang dilakukan oleh Rasulullah tidak hanya pada wilayah domestik, tapi hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Apakah perempuan sebagai ibu, istri, anak, tetangga, dan anggota masyarakat, sekaligus memberi jaminan keamanan untuk perlindungan hak-hak dasar yang telah dianugerahkan Allah S.W.T. kepada manusia.

Status perempuan pada zaman Rasulullah bisa dilihat pada keterlibatan mereka dalam sejumlah peran-peran penting yang memiliki makna historis-monumental. Misalnya dalam proses periwayatan hadits dan pembentukan wacana Islam awal. Sejumlah pendapat yang beredar di kalangan para penulis biografi sahabat mengatakan bahwa tidak diragukan lagi, peranan perempuan sangat besar dalam hal ini. Ibnu Ishaq, menulis biografi awal, menyebutkan bahwa tidak kurang dari 50 perempuan ikut sebagai perawi hadits. Dalam kitab *Al Muwatha* juga cukup banyak hadits yang diriwayatkan oleh perempuan (Mufidah, 2003: 38).

Kebanyakan hadits dikumpulkan selama seabad penuh setelah meninggalnya beliau. Kekhawatiran akan ingatan manusia (*shahabat*) yang serba terbatas serta banyak diantara mereka memiliki prasangka sosial mereka sendiri terhadap persoalan perempuan berdasarkan situasi mereka sendiri. Padahal Rasul mempunyai simpati yang sangat besar terhadap kaum perempuan. Beliau memberdayakan perempuan dengan memberi hak-hak yang tidak diapresiasi oleh kebanyakan laki-laki di sekelilingnya. Bahkan sebagian laki-laki tadi protes

kepada Rasul. Oleh karenanya, ketika para *shahabat* melaporkan hadits tersebut, mereka pasti telah diwarnai oleh prasangkanya sendiri.

Dari ratusan ribu hadits yang telah beredar, dikatakan Imam Bukhori bahwa ia telah mengumpulkan lebih dari enam ratus ribu hadits yang diterima. Setelah diteliti secara seksama yang tersisa tinggal kurang dari lima ribu hadits. Sebagian dari hadits-hadits tersebut (yang telah lulus seleksi) tidak lepas dari “bayang-bayang keraguan”. Bahkan banyak diantara hadits yang kontroversial tersebut justru digunakan untuk memformulasi hukum Islam yang berkaitan dengan masalah perempuan. Terdapat banyak juris Islam berbeda satu sama lainnya tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkawinan/perceraian, warisan, pengasuhan anak. Banyak hadits yang kontroversial tersebut dipandang lebih baik daripada Al-Qur’an itu sendiri (Engineer, 2003: 7-8).

2.4. Gender dan Pembangunan (GAD)

Salah satu pendekatan untuk memberdayakan perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan dan semua kinerja yang melekat pada perempuan, maka pendekatan gender dan pembangunan (*gender and development – GAD*) semestinya patut diperhitungkan. Pendekatan tersebut mengakui betapa pentingnya peran serta perempuan dalam berbagai aspek pembangunan.

Pandangan yang tidak adil terhadap perempuan dengan anggapan dasar bahwa perempuan adalah irasional, emosional, lemah dan lain-lainnya, menyebabkan penempatan perempuan dalam peran-peran yang dianggap kurang penting. Potensi perempuan sering dinilai tidak *fair* oleh sebagian besar masyarakat kita, mengakibatkan sulitnya mereka menembus posisi-posisi strategis dalam komunitasnya, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jika perempuan mampu menembus posisi tersebut, berarti ia telah berhasil dalam kompetisi yang sangat ketat dan perjuangan yang cukup panjang. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Agama sering juga dipakai sebagai landasan pengukuh dari pandangan semacam itu sehingga perempuan selalu menjadi bagian dari laki-laki (Mufidah, 2003: 52)

Dalam kerangka ini pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) lebih diutamakan daripada pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*). Pendekatan ini memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal, dan lebih menekankan pada pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan kesetaraan gender dibandingkan dengan pemberdayaan itu sendiri untuk merubah dan mentransformasikan struktur yang telah ada.

2.5. Teori Karl Marx Tentang Nilai Feminisme

Dalam teorinya yang disebut *Materialist Determinisme*, ia mengungkapkan bahwa akar masalah ketimpangan laki-laki dan perempuan menurut aliran tersebut adalah sistem kelas yang berdasarkan kepemilikan pribadi, secara inherent bersifat menindas dan laki-laki kulit putih mempunyai keistimewaan di dalamnya. Penindasan kelas oleh kapitalis terhadap perempuan yang digunakan sebagai buruh cadangan, tenaga kerja perempuan sangat murah atas dasar perbedaan *sexis* untuk menentukan skala upah. Sumber-sumber ketidakadilan yang berupa penindasan kelas dalam produksi dan eksploitasi struktural memerlukan upaya pembongkaran struktur kapitalisme yang tidak adil terhadap perempuan. Hanya dengan penghapusan kelas secara ekonomis, dan penindasan ekonomi, penindasan patriarkis dapat diselesaikan. Untuk itu diperlukan perubahan penindasan struktur ekonomi dan membangkitkan kesadaran kelas di masyarakat (Mufidah, 2003: 27).

Menurut Marx cara terbaik adalah dengan melakukan revolusi sosial untuk menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat. Konsep Marxis dengan praktis, yaitu penggabungan antara teori dan praktik sebagai pengembangan dari dialektikanya Hegel. Masyarakat feodal yang menguasai sistem kapitalis, dimana kelas ekonomi rendah harus melakukan perjuangan kelas untuk mewujudkan masyarakat komunis.

2.6. Teori Konflik

Menurut Friedrich Hegel (filosof Jerman) konflik merupakan inti dari teori perubahan. Inti ajaran Hegel adalah bahwa setiap perubahan terjadi lewat apa yang disebutnya proses dialektik. Untuk setiap hal yang positif pasti ada yang

negatif. Konsep, sistem berpikir tersusun dalam pasangan yang berlawanan. Setiap hal yang positif oleh Hegel disebut sebuah "*tesis*" dan sebaliknya setiap hal yang negatif disebut "*antitesis*". Pertentangan antara kedua hal tersebut akan menimbulkan pengertian baru yang disebut "*sintesis*". Sintesis ini pada akhirnya akan menjadi tesis yang melahirkan antitesisnya sendiri (Soule, G., 1994: 87).

Wawasan Hegel ini pada akhirnya mempengaruhi dasar teori Karl Marx yang pada gilirannya berpengaruh pada teori perubahan dan *developmentalism*. Menurut Karl Marx, masyarakat terpolarisasi dalam dua kelas yang selalu bertentangan, yaitu kelas yang mengeksploitasi dan kelas yang dieksploitasi. Masyarakat berkembang dari masyarakat komunitas primitif menjadi masyarakat perbudakan, feodal, kapitalis, sosialis, dan akhirnya menuju komunisme. Suatu masyarakat primitif suatu saat digoncangkan karena ditemukannya cara-cara baru untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Namun demikian cara berpikir dan nilai-nilai moral yang lama belum (tidak) berubah, sehingga tidak sesuai lagi dengan situasi baru yang telah berubah. Orang-orang yang memperoleh keuntungan dari sistem lama tentunya akan menentang perubahan tersebut. Jika konflik tersebut cukup tajam maka benturan antara tesis dan antitesis akan melahirkan sistesis (sistem sosial baru). Kondisi seperti ini merupakan miniatur dari perubahan dari feodalisme ke kapitalisme.

Proses perubahan tersebut melalui suatu konflik. Konflik ini terjadi eksploitasi antara kelas borjuis (majikan pemilik alat produksi) dan proletar (buruh penghasil produk) yang diselenggarakan oleh kelas menengah. Hasil dari eksploitasi itu selanjutnya didistribusikan kepada berbagai elemen masyarakat dalam bentuk pajak, bunga bank, sewa tanah, riset pembangunan, dan lain-lain. Sebagai imbalannya lembaga/institusi (suprastruktur) tersebut mendukung kelas borjuis dengan memberkan legitimasi terhadap eksploitasi dalam bentuk norma, penekanan maupun perindasan. Jika kesadaran buruh meningkat dan konflik kelas tidak dapat dikendalikan, maka perubahan pun terjadi (Fakih, 2001: 35).

2.7. Ilmu Ekonomi Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi

Ilmu ekonomi pendidikan (*economics of education*) termasuk ilmu mutakhir yang baru muncul pada awal dekade 1960-an sebagai cabang ilmu ekonomi yang berdiri sendiri. Motivasi utama atas permintaan terhadap pendidikan di negara-negara berkembang adalah untuk mempercepat perbaikan ekonomi yang dicita-citakan (melalui pengembangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan pendapatan lebih tinggi bagi segenap anggota masyarakat). Pandangan ini menitikberatkan perhatian pada tingkat pengeluaran pemerintah bagi bidang pendidikan, rasio penduduk usia sekolah yang bersekolah, tingkat buta huruf, tingkat putus sekolah, serta perbandingan antara tingkat pendapatan yang akan diperoleh melalui peningkatan pendidikan serta biaya-biaya yang diperlukan untuk hal tersebut.

Di kebanyakan negara berkembang, pendidikan formal adalah "industri" dan konsumen terbesar anggaran pemerintah. Anggota masyarakat yang melek huruf dianggap lebih produktif dan lebih tanggap dalam menerima inovasi dan teknologi pertanian baru yang lebih dibandingkan petani yang buta huruf. Tamatan sekolah menengah pertama, dengan sedikit pengetahuan hitung-menghitung dan keahlian administratif sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi administrasi dan teknis pada instansi pemerintah dan swasta. Demikian pula lulusan perguruan tinggi dengan tingkat pelatihan tertentu sangat diperlukan dalam rangka mengelola dan mengembangkan organisasi-organisasi modern milik pemerintah serta asing baik nasional maupun asing.

Perencanaan sumber daya manusia (*manpower planning*) untuk mendapatkan tenaga-tenaga kerja terdidik dalam berbagai tingkatan dalam berbagai sektor pembangunan. Keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi kian disadari dan dimasa yang akan datang berbagai lowongan pekerjaan baik yang terisi maupun yang telah terisi hanya diisi tenaga-tenaga kerja yang dan berpendidikan. Sehingga "doktrin" ini semakin menguatkan semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin banyak ijazah atau sertifikat yang dimiliki maka peluang untuk mencari serta menempati lowongan pekerjaan dan berpenghasilan tinggi semakin semakin terbuka. Sebaliknya bagi golongan yang miskin dalam hal

ini bagian masyarakat yang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang cukup dengan perjuangan keras, maka pendidikan dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk mengangkat anak-anak mereka dari kemiskinan.

2.8. Penawaran dan Permintaan Pendidikan : Hubungan Antara Kesempatan Kerja dan Permintaan Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dienyam oleh seseorang, walaupun banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat nonpasar (atau nonekonomis), namun secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan permintaan dan penawaran, sama hal barang ataupun jasa ekonomi lainnya. Akan tetapi, karena hampir keseluruhan jasa dan fasilitas dibidang pendidikan di berbagai negara-negara berkembang disediakan oleh pemerintah ini merupakan sisi penawaran, maka faktor-faktor penentu dari sisi penawarannya. Dari sisi permintaan, ada dua hal yang paling berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat pendidikan yang diinginkan, yakni: (1) harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik pada sektor modern. Dimasa yang akan datang (hal ini merupakan **manfaat pendidikan individual** (*private benefits of education*) bagi siswa dan/ atau keluarganya ; serta (2) biaya-biaya sekolah, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan atau keluarganya. Dari uraian singkat ini kita sudah mengetahui bahwa sebenarnya permintaan terhadap itu merupakan suatu " permintaan yang tidak langsung " atau **permintaan turunan** (*derived demand*). Di balik permintaan akan pendidikan terhadap permintaan yang lebih mendasar, yakni permintaan terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan penghasilan tinggi di sektor modern. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh sebuah pekerjaan disektormodern, tingkat pendidikan seseorang sangat berperan. Bagi sebagian besar masyarakat dinegara-negara berkembang (terutama golongan yang miskin), mereka menginginkan pendidikan bukan karena alasan-alasan atau manfaatnya yang bersifat nonekonomis (reputasi, gengsi, pengaruh atau kepuasan batin), melainkan ekonomis. Mereka menginginkan pendidikan sebagai suatu wahana dalam rangka

“ mengamankan “ kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan disektor modern. Manfaat-manfaat pendidikan yang tidak langsung inilah yang pada akhirnya akan dipertimbangkan dengan biaya-biayanya.

Dari sisi penawaran, jumlah sekolah pada tingkat sekolah dasar, menengah, dan universitas lebih banyak ditentukan oleh proses politik, yang sering tidaknya ada sangkut pautnya dengan kreteria ekonomi. Sehubungan dengan semakin besar dan kuatnya tekanan-tekanan politik yang diletakkan ke pundak pemerintah negara-negara Dunia ketiga untuk menyediakan tempat sekolah yang lebih banyak, maka kita dapat mengasumsikan dengan aman bahwa tingkat penawaran atau penyediaan tempat tempat sekolah ini (oleh negara) hanya dapat dibatasi oleh kemampuan keuangan negara. Tingkat penawaran pendidikan dari pihak pemerintah itu sendiri terjelma sebagai anggaran belanja pemerintah untuk sektor pendidikan. Pelasanaan atau alokasi anggaran itulah yang akan dipengaruhi oleh tingkat permintaan agregat dari masyarakat terhadap pendidikan. Mengingat tingkat permintaan terhadap pendidikan itu secara umum juga diteentukan oleh tingkat penawarannya (batas-batas kemampuan keuangan pemerintah), maka kita juga perlu melihat secara lebih dekat determinan-determinan (faktor penentu) ekonomis (berorientasi pada kesempatan kerja) dari permintaan pendidikan yang sifatnya tidak langsung ini.

Permintaan atas tingkat pendidikan yang dianggap harus dicapai untuk mendapatkan pekerjaan berpenghasilan tinggi di sektor modern bagi seseorang (dan selanjutnya bagi segenap anggota masyarakat secara keseluruhan) sangat ditentukan oleh kombinasi pengaruh dari empat variabel berikut ini:

1. *Selisih pendapatan atau upah.* Yang dimaksudkan disini adalah perbedaan tingkat upah antara pekerjaan-pekerjaan yang ada di sektor modern dan sektor-sektor lain diluar sektor modern (pertanian keluarga, usaha-usaha wiraswasta di desa-desa maupun dikota, dan sebagainya), yang untuk mudahnya dapat kita sebut sebagai sektor tradisional. Untuk memperoleh pekerjaan disektor modern, tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang sangat menentukan . sebaliknya, sektor tradisional tidak akan menghadapkan seorang calon pekerjanya dengan persyaratan pendidikan tertentu. Semakin besar

perbedaan penghasilan antara sektor modern dengan sektor tradisional , akan semakin besar pula permintaan terhadap pendidikan. Jadi, pola hubungan yang pertama sudah kita peroleh, yakni bahwa permintaan terhadap pendidikan mempunyai hubungan yang positif (berbanding lurus) dengan perbedaan upah antara sektor modern dengan sektor tradisional . Karena, seperti kita ketahui dari studi-studi empiris, perbedaan upah ini dalam kenyataannya memang cukup besar , maka kita dapat memperkirakan tingkat permintaan terhadap pendidikan di negara-negara berkembang akan relatif tinggi.

2. *Besar kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern.*

Seseorang yang berhasil menamatkan pendidikan yang tarafnya cukup memadai untuk dijadikan bekal dalam memasuki pasaran tenaga kerja di sektor modern, dengan sendirinya mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan berpenghasilan tinggi dikota daripada seseorang yang tidak menamatkan pendidikannya. Akan tetapi, jika angka pengangguran di daerah perkotaan terus melonjak, atau jika penyediaan kesempatan kerja ternyata sama sekali tidak memadai untuk menyerap seluruh calon pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang disyaratkannya, maka kita perlu mengganti indikator perbedaan tingkat upah yang aktual dengan selisih upah yang “ diharapkan “ Karena kemungkinan sukses di dunia kerja berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran, maka kita segera dapat mengungkapkan hubungan penting yang kedua, yakni bahwa tingkat permintaan terhadap pendidikan, katakanlah untuk para tamatan sekolah menengah, berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di kalangan tamatan sekolah menengah tersebut.

3. *Biaya-biaya langsung pendidikan individual.* Adapun yang dimaksudkan di sini adalah segenap biaya moneter (uang) yang harus dipikul oleh siswa dan keluarganya untuk membiayai pendidikan. Biaya-biaya ini meliputi uang iuran sekolah, buku-buku, pakaian seragam, serta ongkos-ongkos lainnya. Dapat kita duga segera bahwa tingkat permintaan terhadap pendidikan berbanding terbalik dengan besarnya ongkos-ongkos lainnya, tingkat permintaan individual terhadap pendidikan akan semakin rendah, dengan

asumsi hal-hal lainnya tetap atau konstan (*ceteris paribus*). Bagi penduduk yang berpenghasilan rendah, biaya-biaya langsung dari penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar saja sudah merupakan beban berat yang menghabiskan sejumlah besar pendapatan riil mereka. Dibanyak negara Afrika, misalnya, biaya untuk mengirim seorang anak ke sekolah dasar, rata-rata menghabiskan lebih dari 20 persen pendapatan per kapita keluarga tersebut (ini belum lagi termasuk biaya oportunitas yang terkandung di dalamnya).

Biaya-biaya pendidikan yang bersifat langsung atau biaya oportunitas. Inventasi dalam pendidikan seorang anak bukan hanya meliputi biaya langsung ataupun biaya-biaya moneter (uang) yang harus dikeluarkan secara nyata, akan tetapi juga biaya-biaya yang berupa pendapatan potensial yang harus dikorbankan, apalagi jika si anak sudah mencapai umur dimana mulai dapat memberikan sumbangan produktifitasnya kepada penghasilan keluarga. Pada tahap ini, untuk setiap tahun si anak berada di sekolah akan berarti hilangnya sejumlah penghasilan yang sedianya dapat dihasilkan oleh si anak tersebut bila ia menggunakan waktunya untuk bekerja di tanah pertanian keluarganya. **Biaya oportunitas pendidikan (*oportunity cost of education*)** ini juga merupakan satu variabel penting yang senantiasa mempengaruhi permintaan terhadap pendidikan. Kita dapat menduga bahwa bentuk hubungan antara biaya oportunitas dengan permintaan terhadap pendidikan adalah berbanding terbalik yaitu, semakin besar biaya oportunitas, tingkat permintaan terhadap pendidikan akan semakin kecil.

2.9. Teori Krendensialisme

Teori ini muncul sebagai koreksi dari Teori Human Capital. Menurut teori ini, pendidikan formal hanyalah alat untuk mempertahankan status quo para pemegang status sosial yang lebih tinggi. Pendidikan sering dianggap hanya sebagai alat saring (*filter device*) untuk menyeleksi kelompok orang yang sudah diuntungkan dan sempat memperoleh pendidikan formal serta menghambat kelompok orang yang

tidak mempunyai pendidikan formal, tanpa memperhitungkan kemampuan dan kecakapan kelompok tersebut.

Teori ini menganggap bahwa pendidikan formal tidak lebih dari suatu lambang status sosial. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa penghasilan seseorang cenderung dipengaruhi oleh gelar akademis yang diperoleh dari pendidikan formal tanpa memandang keterampilan dan produktivitasnya.

Oleh karena itu, teori ini meyakini bahwa pelatihan kerja merupakan media yang strategis untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Ketidaksesuaian diantara keduanya dapat dianggap sebagai gejala penawaran (*supply phenomena*), jika ketidaksesuaian tersebut diungkapkan sebagai gejala kekurangan kemampuan sistem pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dasar yang dapat dikembangkan agar menjadi tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan pasar (Ananta, 1993: 85)

Ketidaksesuaian tersebut juga dapat dianggap sebagai gejala permintaan (*demand phenomena*), apabila disebabkan ketidakmampuan lapangan kerja dalam memfungsikan sistem pelatihan kerja industri secara optimal. Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri merupakan gejala permintaan. Oleh karena itu sistem pelatihan kerja harus merupakan bagian integral dalam setiap industri atau perusahaan sebagai sarana untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai.

Menurut Sayuti Hasibuan, kedua teori tersebut erat kaitannya dengan fungsi sistem pendidikan yang meliputi baik dimensi kuantitatif dalam arti sebagai pemasok tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan pasar, maupun dimensi kualitatif dalam arti sebagai penghasil tenaga kerja terdidik sebagai penggerak pembangunan. Fungsi sistem pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja terdidik didasarkan pada teori *human capital*. Sesuai dengan fungsi tersebut, sistem pendidikan sangat berperan dalam hal pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terdidik untuk berbagai bidang pekerjaan dalam arti bahwa tenaga kerja terdidik yang dihasilkan oleh sistem pendidikan harus mempunyai keahlian dan keterampilan sesuai yang dibutuhkan oleh dunia industri.

Fungsi sistem pendidikan dalam menghasilkan tenaga terdidik sebagai penggerak pembangunan didasarkan pada teori kredensialisme. Dimana sistem

pendidikan harus dapat meningkatkan wawasan lulusannya sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, sehingga mampu mengembangkan potensi masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa serta memasarkannya. Dengan demikian lulusan pendidikan diharapkan tidak hanya bergantung pada lapangan kerja yang sudah ada, tetapi yang lebih penting adalah memperluas kesempatan kerja serta lebih jauh mengembangkan kesempatan kerja potensial.

2.10. Gender-related Development Index (GDI)

Laporan UNDP tahun 1995 selain melihat kemajuan pembangunan manusia ternyata dimunculkan ukuran-ukuran baru yang berkaitan dengan isu wanita. Status perempuan cukup mendapatkan perhatian untuk ikut dalam mempengaruhi angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Hal ini dikarenakan peranan wanita semakin diakui dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu bangsa. Ukuran keberhasilan pembangunan yang memperhatikan masalah peranan wanita ini dikenal dengan *Gender-related Development Index* (GDI). Secara teknis dijelaskan bahwa *Gender-related Development Index* (GDI) adalah: “.... a composite measuring average achievement in the three basic dimensions captured in the Human Development Index – a long and healthy, knowledge and a decent standart of living – adjusted to account for inequalities between men and women.” (*Human Development Report 2002: 264*)

Gender-related Development Index (GDI) ini merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan disamping Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). GDI adalah pendekatan yang menggunakan variabel yang tidak berbeda dengan variabel yang digunakan oleh IPM namun juga memperlihatkan perbedaan atau ketidakadilan dalam perspektif gender yang dialami oleh banyak negara berkembang ketika melaksanakan pembangunan. “....*The Gender-related Development Index (GDI) capture achievement in the same set of basic capabilities as the HDI – life expectancy, educational attainment and income – but adjusts the result for gender inequality*” (*Indonesia Human Development Report 2001: 76*)

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini adalah:

1. mengetahui kondisi serta keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan khususnya pada sektor pendidikan di seluruh daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur.
2. mendapatkan dan menyajikan informasi secara empiris, serta aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya disparitas gender di sektor pendidikan pada daerah yang akan diteliti.
3. memetakan kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terdapat kesenjangan gender di sektor pendidikan mulai dari intensitas terendah hingga yang tertinggi.

3.2. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah untuk mempertimbangkan peran serta perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas pembangunan khususnya di bidang pendidikan serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga khususnya perempuan untuk mengenyam pendidikan tanpa adanya diskriminasi.
2. Pengembangan penelitian yang berkaitan dengan problema disparitas gender dalam pembangunan khususnya di sektor pendidikan pada tataran yang lebih luas dan komprehensif.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah seluruh daerah kota dan kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Selain itu, ruang lingkup obyek yang diteliti adalah kondisi ketimpangan gender dalam sektor pendidikan, yakni keadaan melek huruf, angka partisipasi sekolah, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

4.2. Jenis dan Sumber Data

4.2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber data diantaranya: Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Propinsi Jawa Timur; Laporan Tahunan *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk Indonesia; situs Kementerian Negara Pemberdayaan Wanita Republik Indonesia (www.menegpp.go.id) dan berbagai literatur lain yang mendukung. Tersedianya data yang cukup lengkap dan baik dapat mempengaruhi analisis dalam penelitian ini.

4.2.2. Sumber dan periode Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Sensus Penduduk 2000, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 dan Tahun 2002; Laporan Tahunan *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk Indonesia Tahun 2001 (*Indonesia Human Development Report 2001: Towards a New Concensus*); Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2002.

Sedangkan pemilihan periode data yang akan diteliti adalah rentang tahun 2000 hingga 2002. Alasan pemilihan periode data tersebut adalah pada tahun 2000 merupakan awal periode kebangkitan dari krisis ekonomi yang melanda perekonomian nasional termasuk Jawa Timur dalam kurun tahun 1997-1998.

Kondisi ini ditandai dengan kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik. Tahun 2001 dan 2002 merupakan tahun-tahun dengan kondisi sosial ekonomi yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2000 namun memiliki akibat yang cukup memprihatinkan terutama pada ketimpangan gender dalam bidang pendidikan di wilayah Jawa Timur.

4.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu melalui sumber data di Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Laporan Tahunan *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk Indonesia; penelusuran internet dan terbitan atau laporan resmi lainnya. Langkah awal adalah mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari buku/majalah dan laporan resmi maupun penelusuran internet untuk kemudian dilakukan penyuntingan sesuai kebutuhan. Langkah berikutnya adalah pembuatan tabulasi data *cross section* yang kemudian akan dianalisis.

4.4. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan ulasan atau analisis deskriptif kualitatif dan analisis tabel silang. Dalam tulisan ini analisis lebih banyak dilakukan pada disparitas atau ketimpangan gender pada aspek atau bidang yang diteliti diantara daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Analisis data kualitatif yang telah disusun diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas dari permasalahan yang telah disebutkan di atas. Karenanya dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan hipotesis sebagai pijakan dalam memperdalam penelitian ini, sehingga model analisis kuantitatif statistik maupun ekonometrik juga tidak akan dilibatkan. Oleh sebab itu analisis kualitatif lebih ditekankan oleh peneliti dalam pembahasan nanti.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Kondisi Geografis dan Demografis Propinsi Jawa Timur

5.1.1. Kondisi Geografis Propinsi Jawa Timur

Propinsi Jawa Timur mempunyai letak yang cukup strategis, karena posisinya relatif berada di tengah-tengah Nusantara. Di sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Bali, yang terkenal dengan industri pariwisatanya, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah, yang berfungsi sebagai mediator perdagangan dengan daerah lain di pulau Jawa. Di sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan, yang terkenal sebagai salah satu pintu gerbang perdagangan utama untuk wilayah Kalimantan.

Secara umum Propinsi Jawa Timur dapat dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan, dengan proporsi lebih luas, dan Kepulauan Madura. Luas kawasan Jawa Timur secara keseluruhan adalah sekitar 47.921,98 Km² atau sekitar 2,50 persen dari total luas kawasan Indonesia, dimana luas kawasan daratan sekitar 43.034,81 Km² atau sebesar 89,8 persen dari seluruh luas Propinsi Jawa Timur, sisanya adalah wilayah Kepulauan Madura.

Dilihat dari keadaan geografinya, Propinsi Jawa Timur dapat dibagi menjadi 4 sub-area. *Pertama*, kawasan tengah, berupa lahan yang paling subur, meliputi Kabupaten Ngawi sampai dengan Banyuwangi, beberapa kabupaten sepanjang sungai Brantas, Madiun, Koto dan Sampen. *Kedua*, kawasan utara, berupa lahan yang cukup subur, meliputi pegunungan di daerah Bojonegoro, Tuban sampai ke pulau Madura. *Ketiga*, kawasan selatan yang membentang dari daerah Kabupaten Malang bagian selatan sampai daerah Kabupaten Pacitan. Tingkat kesuburan kawasan selatan di bawah kawasan utara. *Keempat*, adalah kawasan yang meliputi Kabupaten Gresik,

Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang dan Kepulauan yang berada di Kabupaten Sumenep yang mempunyai struktur tanah dengan kandungan batu kapur dan alluvial yang sangat banyak.

Secara administrasi Propinsi Jawa Timur terbagi menjadi 615 Kecamatan dan 8.404 Desa/Kelurahan. Dilihat dari komposisi jumlah kecamatan dan desa, Kabupaten Malang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu 35 kecamatan dengan rata-rata luas wilayah perkecamatan sebesar 135,11 Km². Banyaknya jumlah kecamatan yang dimiliki tidak secara otomatis menjadi daerah dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak pula. Karena kabupaten yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak justru di Kabupaten Lamongan, yaitu sebesar 475 desa/kelurahan dengan luas wilayah rata-rata perdesa/kelurahan sebesar 3,82 Km². Sementara itu, daerah dengan luas wilayah yang paling besar adalah Kabupaten Banyuwangi dengan luas total wilayah sebesar 5.782,50 Km² atau 275,36 Km² per kecamatan.

Dari struktur tanahnya Jawa Timur bagian tengah yaitu sebagian wilayah ex Karesidenan Madura, Kediri dan Malang merupakan daerah memiliki tanah yang subur karena merupakan daerah aliran sungai Brantas dan sungai lainnya sehingga daerah ini sangat cocok untuk lahan pertanian. Jawa Timur bagian selatan membentang dari sebagian wilayah Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Malang Selatan merupakan daerah yang kurang subur untuk lahan pertanian karena tanahnya adalah bagian dari pegunungan kapur selatan yang berawal dari daerah Gunung Kidul.

5.1.2. Kondisi Umum Demografis Propinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil Supas 1995 jumlah penduduk Jawa Timur adalah 33.844.002 jiwa sedangkan menurut Sensus Penduduk 1990 penduduk Jawa Timur sebesar 32.487.704 jiwa, berarti selama kurun waktu tersebut telah terjadi penambahan penduduk sebesar 3,11 persen atau sebesar 0,62 persen setiap tahunnya. Selanjutnya berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk perempuan lebih besar dari pada penduduk laki-laki. Jumlah penduduk

perempuan mencapai jumlah 50,96 persen sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 49,04 persen.

Sex ratio secara keseluruhan adalah 96,24 dan apabila dilihat menurut daerah tempat tinggalnya *sex ratio* untuk daerah kota adalah 94,77 dan untuk daerah pedesaan adalah 96,94. Untuk kelompok umur penduduk muda yaitu penduduk dibawah usia 15 tahun *sex ratio* secara keseluruhan menunjukkan hal yang berbeda. Secara keseluruhan besarnya *sex ratio* adalah 105,39 sedangkan *sex ratio* dengan usia yang sama untuk daerah pedesaan sebesar 106,44 dan daerah kota sebesar 102,47.

Sedangkan menurut hasil Sensus Penduduk 2000 jumlah penduduk Jawa Timur berkembang menjadi 34.765.998 jiwa yang terdiri dari 17,19 juta jiwa laki-laki dan 17,57 juta jiwa perempuan. Adapun *sex ratio*-nya sebesar 97,84. Bila dibandingkan dengan Sensus Penduduk 1990 maka jumlah penduduk Jawa Timur mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,70 persen per tahun. Dengan asumsi pertumbuhan penduduk stabil maka diperkirakan pada tahun 2011 jumlah penduduk Jawa Timur akan menjadi dua kali lipat. Melihat struktur penduduknya maka Jawa Timur telah mengalami pergeseran dari struktur penduduk muda ke penduduk tua. Kondisi ini ditunjukkan oleh meningkatnya persentase penduduk usia tua (65 tahun ke atas) yaitu dari 4,82 persen pada tahun 1990 menjadi 5,96 persen pada tahun 2000.

Jika dilihat struktur penduduknya Jawa Timur dapat dikatakan mempunyai struktur penduduk muda yang terlihat melebar di bagian bawah (usia 0-14 tahun) dan makin mengecil di bagian atas (usia 65 tahun ke atas). Untuk melihat laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur selama kurun waktu 1971 sampai 2000 dapat dilihat dari Tabel 5.1.

Terjadinya laju pertumbuhan yang makin memurun diduga karena keberhasilan program Keluarga Berencana yang telah dimulai pada tahun 1976 dan nampaknya hal ini diakui secara nasional. Disamping itu laju pertumbuhan yang makin memurun dapat juga disebabkan karena adanya arus

migrasi keluar yang lebih besar dibanding dengan migrasi masuk ke Jawa Timur.

Tabel 5.1.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur
Menurut Tempat Tinggal Tahun 1971 - 2002

Tahun	Desa	Kota	Total	Pertumbuhan (%)
1971	21.814.076	3.694.311	25.508.387	-
1980	23.448.517	5.720.487	29.169.004	1,45
1985	24.006.122	7.255.469	31.261.591	1,43
1990	23.571.127	8.916.617	32.487.744	0,78
1995	22.993.602	10.850.400	33.844.002	0,62
2000	20.980.771	13.785.227	34.765.998	0,54
2002	20025015	15123564	35.148.579	0,55

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, berbagai terbitan

Berdasarkan hasil Susenas 2002 jumlah penduduk Jawa Timur mencapai sekitar 35.148.579 jiwa yang terdiri dari 49,08 persen penduduk laki-laki dan 50,92 persen penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) mencapai angka 96,37 persen, atau pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 96 penduduk laki-laki.

Biasanya *sex ratio* diawali dengan angka diatas 100 pada saat lahir yang berarti lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Selanjutnya dalam perjalanan usia secara berangsur-angsur akan menurun hingga kurang dari 100. Untuk daerah yang tidak besar pengaruh migrasi (masuk/keluar), *sex ratio* kurang dari seratus biasanya menandakan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Menurut kelompok umur sekitar 25,35 persen berada dalam kelompok umur 0 – 14 tahun, 68,25 persen dalam kelompok umur 15 – 64 tahun dan sekitar 6,40 persen dalam kelompok umur 64 tahun ke atas. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, telah terjadi pergeseran yang

mengarah pada semakin berkurangnya persentase kelompok umur anak-anak (0-14) kemudian diikuti dengan semakin meningkatnya komposisi pada kelompok umur di atasnya.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2001, pada kelompok umur 0-14 tahun mengalami penurunan terbesar pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu sekitar 0,47 persen. Sedangkan pada kelompok umur 15-64 tahun, tampak kenaikan yang cukup besar pada kelompok umur 30-39 tahun dan 45-49 tahun.

Dilihat dari tempat tinggal yaitu desa dan kota ternyata laju pertumbuhan penduduk di daerah kota selalu lebih tinggi daripada laju pertumbuhan di daerah pedesaan. Walaupun secara keseluruhan menunjukkan tendensi yang menurun. Untuk daerah kota selama periode 1971-1995 laju pertumbuhan menunjukkan angka yang selalu menurun dimana laju pertumbuhan untuk periode 1971-1980 sebesar 6,09 persen, periode 1980-1985 sebesar 5,36 persen ; periode 1985-1990 sebesar 4,57 persen dan periode 1990-1995 sebesar 4,33 persen.

Demikian halnya di daerah pedesaan laju pertumbuhan juga mempunyai tendensi yang menurun bahkan telah laju pertumbuhan yang negatif. Secara keseluruhan laju pertumbuhan periode 1971-1980 sebesar 0,83 persen ; periode 1980-1985 sebesar 0,48 persen ; periode 1985-1990 sebesar - 0,36 persen dan untuk periode 1990-1995 sebesar - 0,49 persen. Menurunnya laju pertumbuhan ini seperti dikatakan sebelumnya diduga disebabkan oleh keberhasilan Program Keluarga Berencana, dan juga karena migrasi desa - kota termasuk juga urbanisasi.

Dilain pihak berdasarkan sebaran penduduk menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih berada di pedesaan yaitu mencapai 60,35 persen, sedangkan sisanya sekitar 39,65 persen berada di perkotaan. Jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 1990 maka terdapat penurunan persentase penduduk yang berada di pedesaan sekitar 12,17 persen. Penurunan persentase penduduk di pedesaan antara lain disebabkan karena

terjadi perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan serta terjadinya perubahan status wilayah administrasi dari pedesaan menjadi perkotaan.

Tingkat kepadatan penduduk Jawa Timur pada tahun 2002 mencapai sekitar 757 jiwa per kilometer persegi. Bila dibandingkan dengan tahun 2001 tampak ada peningkatan kepadatan penduduk sekitar 4 jiwa per kilometer persegi. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang secara relatif lebih meningkat dibandingkan luas wilayahnya. Lihat Lampiran 1.

5.2. Gambaran Umum Pendidikan di Jawa Timur

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan seseorang sebagai subyek sekaligus obyek untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Mengingat pendidikan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan formal dan non formal.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu daerah tidak akan lepas dari peningkatan kualitas dan tingkat pendidikan penduduknya. Pendidikan terutama diperlukan sebagai dasar untuk pengembangan pola pikir konstruktif, kreatif dan inovatif. Oleh karena itu pendidikan dapat dijadikan salah satu indikator kemajuan suatu daerah, karena dengan pendidikan yang cukup memadai, kualitas penduduk akan menjadi lebih baik.

Tabel 5.1.
Usia Sekolah Berdasarkan Kelompok Umur

Jenjang Sekolah	Kelompok Umur
Sekolah Dasar (SD)	7-12 tahun
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	13-15 tahun
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	16-18 tahun
Perguruan Tinggi	19-24 tahun

5.2.1. Penduduk Usia Sekolah dan Partisipasi Sekolah

Penduduk yang termasuk dalam pembahasan dalam bagian ini adalah penduduk usia sekolah. Dimana kategori usia sekolah yang dimaksud masing-masing berada pada jenjang SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi seperti tampak pada Tabel 5.1.

Berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin maka jumlah penduduk usia sekolah di Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 5.2. berikut. Dari tabel tersebut sepintas terlihat bahwa selama kurun waktu 1998 hingga 2002 jumlah penduduk laki-laki yang berusia Sekolah Dasar hingga Sekolah Lanjutan Atas lebih besar daripada perempuan. Tetapi menginjak usia sekolah di perguruan tinggi (19-24 tahun) jumlah penduduk laki-laki yang berusia Sekolah Dasar hingga Sekolah Lanjutan Atas lebih kecil daripada perempuan.

Tabel 5.2.
Jumlah Penduduk Jawa Timur Pada Usia Sekolah Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 1998 -2002

Keterangan	1998	1999	2000	2001	2002
Usia 5-6 Tahun					
L	619.455	621.058	659.134	678.991	598.111
P	571.629	540.888	584.125	628.230	591.608
L+P	1.191.084	1.170.946	1.253.259	1.307.221	1.189.719
Usia 7-12 Tahun					
L	2.015.622	1.968.561	1.922.353	1.933.904	1.919.350
P	1.897.658	1.817.304	1.818.380	1.856.633	1.819.445
L+P	3.913.280	3.785.865	3.740.713	3.790.537	3.738.795
Usia 13-15 Tahun					
L	1.106.159	1.043.812	996.965	950.917	907.551
P	1.000.365	971.814	933.735	870.904	862.541
L+P	2.106.524	2.015.626	1.930.700	1.821.821	1.770.092
Usia 16-18 Tahun					
L	1.012.820	1.080.556	1.033.738	994.783	1.021.168
P	997.173	1.052.777	962.949	960.101	951.357
L+P	2.009.993	2.133.333	1.996.687	1.954.884	1.972.525
Usia 19-24 Tahun					
L	1.489.665	1.574.991	1.656.350	1.593.203	1.649.981
P	1.747.011	1.742.598	1.729.778	1.780.069	1.799.956
L+P	3.236.676	3.317.589	3.386.128	3.373.272	3.449.937

Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Timur, Buku 1: 180

5.2.2. Partisipasi Sekolah

Peningkatan kesempatan dan hasrat memperoleh pendidikan diantaranya dapat dilihat dari indikator angka partisipasi sekolah (APS) di tingkat SD/MI, SLTP, SLTA. Angka partisipasi sekolah merupakan gambaran tingkat partisipasi dan keikutsertaan masyarakat untuk mengikuti pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, biasanya semakin rendah tingkat partisipasinya, walaupun dalam setiap tingkatan semakin menunjukkan peningkatan APS. Lihat Tabel 5.3.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Propinsi Jawa Timur tahun 2002, APS untuk penduduk berumur 7–12 tahun (usia Sekolah Dasar) sekitar 96,73 persen dengan persentase yang tidak berbeda jauh antara laki-laki (96,23 persen) dan perempuan (97,26 persen). APS untuk penduduk usia 13 -15 tahun (usia Sekolah Lanjutan Pertama) sekitar 79,80 persen. APS untuk penduduk kelompok usia 16–18 tahun (Sekolah Menengah Umum) dan usia 19–24 tahun (usia Perguruan Tinggi) masing-masing sebesar 51,10 persen dan 11,10 persen.

Tabel 5.3.
Angka Partisipasi Sekolah
Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 1998 – 2002

Tahun	SD	SLTP	SLTA
1998	96,51	77,75	49,26
1999	95,41	79,74	50,49
2000	96,14	80,57	51,04
2001	96,92	81,59	51,53
2002	96,73	81,83	51,84

Sumber: BPS Jawa Timur

APS untuk SD/MI adalah paling besar dibandingkan pada tingkat pendidikan di atasnya. Demikian pula untuk tingkat SLTP APS-nya masih

cukup besar. Angka-angka tersebut menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan di tingkat dasar sangat tinggi, dan menurun ketika masuk tingkatan yang lebih tinggi. Angka partisipasi sekolah untuk semua jenjang pendidikan dalam periode tersebut terus mengalami kenaikan kecuali pada jenjang Sekolah Dasar pada tahun 1999 dan 2002.

5.2.2.1. Partisipasi Sekolah Usia SD (7-12 Tahun)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia SD (7-12 tahun) pada tahun 1998 tercatat sebesar 95,61 persen yang berarti untuk setiap 100 anak usia 7–12 tahun terdapat sekitar 96 anak yang masih bersekolah dan sisanya yaitu sekitar 2,75 persen anak usia SD tidak/ belum pernah sekolah dan 1,65 persen lainnya tidak bersekolah lagi, yang mungkin dikarenakan juga droup out atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Perkembangannya selama lima tahun terakhir (1998–2002) menunjukkan adanya kecenderungan semakin meningkat meskipun pada tahun 1999 dan 2002 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Yaitu pada tahun 1999 APS sedikit menurun menjadi 95,41 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,14 persen, tahun 2000 menjadi 96,14 persen, tahun 2001 meningkat lagi menjadi 96,92 persen dan terakhir pada tahun 2002 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,59 persen sehingga menjadi 96,73 persen.

5.2.2.2. Partisipasi Sekolah Usia SLTP (13-15 Tahun)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia SLTP (13-15 tahun) pada tahun 1998 tercatat sebesar 77,75 persen yang berarti untuk setiap seratus anak usia 13-15 tahun terdapat sekitar 78 anak yang masih sekolah. Sisanya sekitar 1,23 persen tidak/belum pernah sekolah dan 21,02 persen tidak bersekolah lagi yang mungkin dikarenakan memang droup out atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

APS usia SLTP selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2002 APS usia SLTP mencapai 88,83 persen atau mengalami peningkatan sebesar 4,08 persen dibanding tahun 1998.

Jika diperhatikan APS usia SLTP tahun 2002 menurut kabupaten/kota, terdapat sebanyak 7 daerah yang persentasenya diatas 95 persen, yaitu Kabupaten Lamongan, Sidoarjo, Magetan, Kediri, Mojokerto, Madiun, dan Blitar. Sedangkan APS usia SLTP yang kurang dari 60 persen sebanyak 3 daerah yaitu di Kabupaten Probolinggo, Bangkalan, dan yang terendah adalah di Kabupaten Sampang (43,30 persen).

Perkembangan anak usia 13-15 tahun yang tidak/belum pernah sekolah selama 5 tahun terakhir tampak persentasenya cenderung mengalami penurunan. Berturut-turut pada tahun 1998 sebesar 1,23 persen selanjutnya menurun menjadi 1,11 persen pada tahun 1999, pada tahun 2000 menurun lagi menjadi 1,05 persen, tahun 2000 menjadi 0,98 dan terakhir pada tahun 2002 menjadi 0,97 persen.

Selanjutnya untuk anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi, selama tahun 1998-2002 menunjukkan pola huruf "U", namun demikian sebenarnya menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Pada tahun 1988 anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi ialah sebesar 21,02 persen kemudian turun menjadi 17,20 persen pada tahun 2002.

5.2.2.3. Partisipasi Sekolah Usia SLTA (16-18 Tahun)

APS untuk usia SLTA (16-18 tahun) pada tahun 1998 tercatat sebesar 49,26 persen yang berarti untuk setiap 100 anak usia 16-18 tahun terdapat sekitar 49 yang masih bersekolah dan sisanya sekitar 2,12 persen tidak/belum pernah sekolah dan 48,32 persen tidak bersekolah lagi yang mungkin dikarenakan memang drop out atau sudah tamat SLTP tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SLTA.

APS usia SLTA apabila diperhatikan perkembangannya selama 5 tahun terakhir (1998-2002) tampak adanya kecenderungan semakin meningkat yaitu dari 49,26 pada 1998 menjadi 51,84 persen atau meningkat sebesar 2,58 persen pada tahun 2002.

Apabila APS usia SLTA pada tahun 2002 diperhatikan menurut kabupaten/ kota sebagaimana data terlampir, tampak daerah yang APS-nya diatas 75 persen sebanyak 6 daerah yaitu Kabupaten Magetan dan Sidoarjo, Kota Mojokerto, Blitar, Kediri dan Madiun. Sedangkan yang kurang dari 30 persen ada 3 daerah yaitu Kabupaten Probolinggo, Bangkalan dan yang terendah adalah Kabupaten Sampang (12,95 persen).

Melihat perkembangan anak usia 16-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah selama periode 5 tahun terakhir tampak persentasenya cenderung semakin menurun. Pada tahun 1998 sebesar 2,12 persen selanjutnya pada tahun 2002 menjadi 1,36 persen.

5.2.3. Angka Buta Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan lainnya adalah kemampuan baca-tulis penduduk (*literacy*) yakni kemampuan intelektual paling mendasar yang harus dikuasai penduduk. Hal ini dikarenakan sebagian besar informasi dan ilmu pengetahuan disajikan melalui media tulisan. Secara negatif, kemampuan baca tulis biasanya diketahui melalui angka buta huruf (ABH).

Selama periode 1998–2002 angka buta huruf untuk penduduk usia 10 tahun ke atas pada tahun 1998 sekitar 17,00 persen. Selanjutnya menurun menjadi 16,69 persen pada tahun 1999 dan menurun lagi menjadi 16,39 persen pada tahun 2000. Pada tahun 2001 menjadi 15,78 persen dan terakhir pada tahun 2002 turun menjadi 15,16 persen, seperti tampak pada Tabel 5.4.

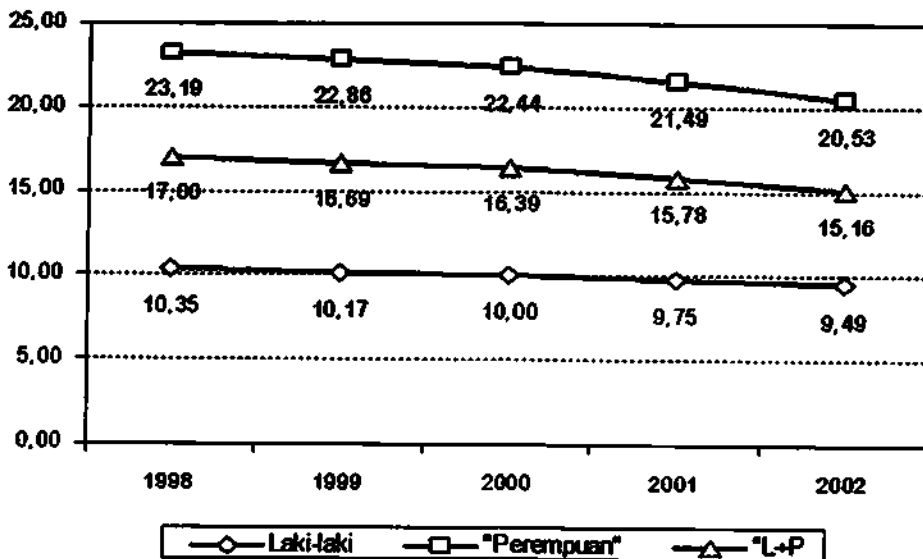
Tabel 5. 4.
Angka Buta Huruf dan Angka Melek Huruf Umur 10 Tahun Ke Atas
di Jawa Timur
Tahun 1998 - 2002

Urutan	1998	1999	2000	2001	2002
Angka Buta Huruf (persen)	17,00	16,69	16,39	15,78	15,16
Angka Melek Huruf (persen)	83,00	83,31	83,61	84,22	84,84
Jumlah (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N (000 jiwa)	28.247,60	28.655,88	28.917,87	28.921,48	29.325,32

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur diolah, Susenas Tahun 1998-2002

Untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut tentang Angka Buta Huruf menurut kelompok umur, sehingga bisa diketahui pada kelompok umur berapa terdapat ABH dengan persentase tinggi, sebagaimana terlihat pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1.
Angka Buta Huruf Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas
Propinsi Jawa Timur 1998 - 2002



Selama tahun 1998-2002 terjadi penurunan ABH pada semua kelompok umur maupun jenis kelamin. Pada tahun 2002 ABH untuk kelompok umur 7-12 tahun (usia SD) sekitar 6,05 persen yang berarti diantara 100 anak usia SD

terdapat sekitar 6 anak tidak dapat membaca/ menulis, yang terdiri dari anak yang belum/tidak sekolah ataupun yang anak putus sekolah sebelum bisa membaca/ menulis, dan anak yang sedang berada di bangku sekolah tetapi belum bisa membaca/menulis, terutama pada anak kelas 1 SD/MI.

Selanjutnya ABH pada kelompok umur 13 – 15 tahun (usia SLTP) hanya sebesar 0,94 persen atau merupakan yang terendah diantara kelompok umur yang lain. Keadaan ini memperlihatkan bahwa untuk usia SLTP hampir semua penduduk bisa membaca/menulis baik huruf lain maupun huruf lainnya. Selanjutnya ABH untuk kelompok umur 16–18 tahun (usia SLTA) sebesar 1,35 persen dan ABH pada kelompok umur 19–24 tahun (usia perguruan tinggi) sebesar 1,71 persen. Pada kelompok umur berikutnya ABH semakin tinggi, yang antara lain juga mencerminkan bahwa semakin tinggi kelompok umur penduduk, semakin tinggi tingkat pendidikannya. Hal ini wajar karena pada masa penjajahan hingga masa awal kemerdekaan, hanya sedikit penduduk yang bisa memperoleh pendidikan.

Semakin rendahnya ABH pada kelompok umur yang semakin muda (umur 39 tahun ke bawah), antara lain mencerminkan keberhasilan di bidang pendidikan, yaitu sejak adanya SD Inpres pada sekitartahun 1970-an dan Gerakan Wajib Belajar yang dimulai sejak tahun 1984.

Apabila dilihat ABH penduduk usia 10 tahun, pada tahun 2002 masih terdapat daerah yang ABH – nya mencapai lebih dari 30 persen antara lain di Kabupaten Situbondo (30,01 persen), Bondowoso (34,26 persen) dan ABH yang tertinggi adalah di Kabupaten Sampang yaitu mencapa sekitar 41,46 persen.

Untuk ABH yang cukup rendah yaitu mencapai kurang dari 10 persen terdapat pada 10 daerah, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Gresik serta seluruh Kota yang ada (7 Kota). Untuk selengkapnya hal ini dapat dilihat pada Lampiran 2.

5.2.4. Rata-rata Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk (*means years of schooling/MYS*) dapat diketahui dari melalui lama sekolah, yakni rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. MYS ini ini dihitung dengan menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata lama sekolah cenderung meningkat dan hingga tahun 2002 telah mencapai kisaran 6 tahun. Pada tahun 1998 lama sekolah sekitar 5,82 tahun. Selanjutnya meningkat lagi menjadi 6,16 tahun pada tahun 2000. Berikutnya pada tahun 2001 menjadi 6,31 tahun dan terakhir tahun 2002 meningkat lagi menjadi 6,46 tahun.

Apabila diperhatikan menurut kabupaten/kota, pada tahun 2002 terdapat 5 kabupaten/kota yang memiliki rata-rata lama sekolah bagi penduduk umur 15 tahun keatas diatas 9 tahun, yaitu terdapat Kabupaten Sidoarjo (9,06 tahun), Kota Mojokerto (9,17 tahun), Kota Madiun dan Surabaya (masing-masing 9,41 tahun) dan yang tertinggi adalah Kota Malang (9,48 tahun).

Sementara itu rata-rata lama sekolah yang terendah berkisar antara 3 sampai dengan 5 tahun, yaitu terdapat pada 10 kabupaten/kota, terutama di daerah "Tapal Kuda" dan "pantura" bagian barat antara lain Kabupaten Bojonegoro (5,42 tahun), Jember (5,39 tahun), Pamekasan (5,26 tahun), Tuban (5,25 tahun), Bangkalan (4,96 tahun), Probolinggo (4,8 tahun), Situbondo (4,45 tahun), Bondowoso (4,07 tahun), Sumenep (4,03 tahun), dan yang terendah adalah Kabupaten Sampang (3,02 tahun). Lihat Lampiran 3.

5.2.5. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Indikator lain yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan penduduk ialah komposisi penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Selama lima tahun terakhir peningkatan pendidikan penduduk 15 tahun keatas ditandai dengan menurunnya persentase penduduk berpendidikan rendah kemudian diikuti dengan meningkatnya persentase penduduk pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi (lihat Tabel 5.5). Persentase penduduk Jawa Timur 15 tahun ke atas yang berpendidikan rendah (SD ke bawah) masih cukup besar, walau sebagian besar diantaranya adalah penduduk dewasa dan tua. Oleh karena itu proporsi penduduk yang berpendidikan rendah tersebut secara berangsur akan turun sejalan dengan peralihan generasi dan perluasan kesempatan melanjutkan sekolah.

Tabel 5.5.
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Propinsi Jawa Timur 1998 – 2002 (%)

Keterangan	1998	1999	2000	2001	2002
Tidak/belum sekolah	17,89	17,49	16,91	16,25	15,45
Tidak tamat SD	19,3	18,65	18,01	17,34	16,66
SD	31,02	31,37	31,91	32,34	32,92
SLTP	14,94	15,29	15,63	16,03	16,42
SLTA	14,01	14,24	14,38	14,67	14,87
PT	2,84	2,96	3,15	3,36	3,68
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N (000 jiwa)	24.797,33	25.345,79	25.783,49	25.783,49	25.237,96

Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Timur, Buku 1: 181

Adapun persentase penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan apabila menurut kabupaten/kota tampak pada tahun 2002 persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat SD sederajat atau kurang mencapai 80 persen atau lebih antara lain terdapat pada Kabupaten Bondowoso, Bangkalan, Sumenep, bahkan Sampang masih lebih dari 90 persen.

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat SD sederajat atau kurang sekitar 40 persen (cukup baik) antara lain terdapat pada Kabupaten Sidoarjo, Kota Blitar, Kediri, Malang, Mojokerto, Surabaya. Terendah adalah Kota Madiun yakni sekitar 31,11 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

5.3. Disparitas Gender Pada Sektor Pendidikan di Jawa Timur

5.3.1. Kesenjangan Gender : Wanita dalam Pendidikan

Pada bagian ini akan dikemukakan profil pendidikan perempuan dalam perbandingannya dengan profil pendidikan laki-laki yang terjadi pada berbagai daerah di Jawa Timur. Indikator pendidikan yang dibahas meliputi antara lain pendidikan yang ditamatkan (*educational attainment*); tingkat melek huruf orang dewasa (*adult literacy rate*); dan partisipasi sekolah (*school enrollment*).

Secara global kalau dibandingkan dengan kaum pria, kesempatan untuk mengecap pendidikan bagi para wanita muda (remaja dan usia sekolah) ternyata sangat tertinggal. Sebagai gambaran umum di 66 dari 108 negara berkembang, jumlah anak perempuan yang duduk di bangku sekolah dasar dan menengah selalu lebih kecil, setidaknya-tidaknya 10 persen, daripada jumlah anak laki-laki. *Kesenjangan pendidikan antarjenis kelamin (educational gender gap)* tersebut semakin mencolok di negara-negara miskin. Jika gambarnya dilihat per kawasan, maka ketimpangan pendidikan antarjenis kelamin yang terbesar ada di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Todaro, 2000: 334).

Tabel 5.5.

Kesenjangan Pendidikan Antargender.
Rasio Partisipasi Pelajar Wanita Terhadap Pria

Negara	Melek Huruf Dewasa	Rata-rata Masa Sekolah	Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
Afghanistan	32	14	52	50	24
Aljazair	66	18	89	79	44
Bangladesh	47	29	86	46	19
Mesir	54	41	79	82	52
India	55	34	97	57	45
Meksiko	94	96	97	100	76
Maroko	62	37	68	70	58
Nigeria	65	28	93	74	37
Kor. Selatan	95	61	100	96	49
Sudan	28	45	71	87	70
Semua NSB	71	55	91	72	51

Sumber: UNDP, Human Development Report, 1994.

5.3.2. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Pada bagian ini akan dibahas beberapa fenomena ketimpangan gender yang terdapat pada sektor pendidikan di Jawa Timur. Diantaranya adalah: tentang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk baik di tingkat dasar, menengah maupun pendidikan tinggi.

Secara umum pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk di Jawa Timur lebih didominasi oleh pendidikan laki-laki dibandingkan penduduk perempuan terutama pada jenjang pendidikan menengah ke atas. Hal ini tampak dari Tabel 5.6. berikut bahwa selama kurun waktu lima tahun tersebut kesenjangan pendidikan tertinggi antara laki-laki dan perempuan tampaknya terus berlangsung. Kondisi ketimpangan tersebut lebih banyak terjadi pada lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun keadaan yang cukup menyedihkan justru sebaliknya terjadi pada penduduk yang tidak/belum sekolah maupun penduduk yang tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar.

Ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan tersebut mempunyai kecenderungan semakin menurun khususnya untuk jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah tingkat atas selama kurun lima tahun tersebut. Artinya pada jenjang pendidikan yang dimaksud, dominasi kaum laki-laki atas perempuan dalam periode tersebut perbedaannya semakin mengecil sejalan dengan perubahan waktu. Demikian pula sebaliknya mayoritas perempuan atas laki-laki pada kelompok yang tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD juga semakin menurun dalam kurun waktu tersebut.

Sementara itu baik di pihak laki-laki maupun perempuan sebagian besar jenjang pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan adalah pada tingkat sekolah dasar yakni berkisar 33 hingga 34 persen untuk laki-laki dan 28 hingga 31 persen untuk perempuan. Keadaan ini menguatkan bahwa rata-rata masa sekolah bagi penduduk perempuan di Jawa Timur masih lebih pendek daripada penduduk laki-laki, yakni 5,3 tahun dan 6,7 tahun (UNDP, 2001:93).

Tabel 5.6.
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas
Menurut Jenis Kelamin di Jawa Timur Tahun 1998-2002 (%)

Uraian	1998	1999	2000	2001	2002
Laki-laki					
Tidak/belum sekolah	10,70	10,59	10,33	10,01	9,53
Tidak tamat SD	19,09	18,46	17,86	17,19	16,57
SD	33,21	33,41	33,76	33,97	34,33
SLTP	16,47	16,79	17,09	17,44	17,74
SLTA	17,12	17,23	17,26	17,47	17,56
PT	3,41	3,52	3,70	3,91	4,26
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N (000 jiwa)	11.853.94	12.211.78	12.446.19	12.493.31	12.705.91
Perempuan					
Tidak/belum sekolah	24,51	23,89	23,05	22,12	21,01
Tidak tamat SD	19,46	18,83	18,16	17,48	16,85
SD	28,89	29,48	30,18	30,80	31,60
SLTP	13,55	13,90	14,28	14,70	15,15
SLTA	11,21	11,46	11,69	12,04	12,25
PT	2,29	2,44	2,63	2,84	3,14
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N (000 jiwa)	12.943.40	13.134.04	13.309.20	13.290.17	13.532.05
Laki-laki+Perempuan					
Tidak/belum sekolah	17,89	17,49	16,91	16,25	15,45
Tidak tamat SD	19,30	18,65	18,01	17,34	16,66
SD	31,02	31,37	31,91	32,34	32,92
SLTP	14,94	15,29	15,63	16,03	16,42
SLTA	14,01	14,24	14,38	14,67	14,87
PT	2,84	2,96	3,15	3,36	3,68
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N (000 jiwa)	24.797.33	25.345.79	25.755.39	25.783.49	26.237.96

Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Timur, Buku 1: 181

Di lain pihak, persentase perempuan yang “tidak/belum sekolah” dan “tidak tamat SD” merupakan kelompok terbesar berikutnya. Pada kelompok tersebut – terutama pada kelompok “tidak tamat SD” – persentase perempuan lebih besar bila dibandingkan pada jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Meskipun selama kurun waktu lima tahun tersebut keadaan ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun seiring dengan kondisi perekonomian yang semakin membaik.

Sebaliknya pada kelompok pendidikan yang sama keadaan laki-laki tidak separah yang terjadi pada perempuan. Hal ini terlihat dari prosentase laki-laki yang “tidak/belum sekolah” yang jumlahnya mencapai 10,70 persen pada tahun 1998 dan secara berangsur-angsur menjadi 9,53 persen pada tahun 2002. Sedangkan persentase laki-laki yang “tidak tamat SD” jumlah hampir sebanding dengan persentase perempuan dan mempunyai kecenderungan semakin menurun dalam kurun waktu 5 tahun tersebut.

Pada bagian lain, kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang cukup mencolok terjadi ketika jenjang pendidikan dari SLTP menuju ke jenjang berikutnya yakni SLTA. Persentase laki-laki yang melanjutkan pendidikan dari SLTP ke SLTA dalam periode 5 tahun tersebut menunjukkan kecenderungan selalu meningkat, kecuali dari tahun 2001 ke 2002. Sebaliknya persentase perempuan yang melanjutkan pendidikan dari jenjang SLTP ke SLTA justru terjadi penurunan dari tahun 1998 sampai dengan 2002.

Dugaan bahwa nilai anak laki-laki secara sosial lebih tinggi daripada anak perempuan masih banyak dianut oleh masyarakat di beberapa daerah. Penelitian Bagong Suyanto di Jawa Timur (2001) menyebutkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kondisi anak putus sekolah atau tidak mau bersekolah diakibatkan oleh faktor ekonomi. Dikatakan bahwa anak adalah salah satu penyangga ekonomi keluarga yang cukup penting selain ibu. Bahkan tidak jarang terjadi, besarnya penghasilan yang diberikan anak kepada orang tua justru lebih besar daripada penghasilan orangtua. Bahkan di keluarga miskin melarang sama sekali kepada anak agar tidak turut mencari nafkah justru akan menimbulkan masalah baru yang tak kalah rumitnya. (Suyanto, 2001: 42).

Pada tahun 2000 kondisi ketimpangan gender di sektor pendidikan secara umum menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat dilihat pada Tabel 5.7. berikut. Melihat kinerja Propinsi Jawa Timur untuk sektor pendidikan tampak bahwa untuk kategori siswa “tidak/belum tamat” dan “Tamat”

sekolah dasar masih banyak didominasi oleh kaum perempuan dibandingkan laki-laki masing-masing dengan proporsi sebesar 82 dan 97 atau diantara 100 perempuan maka terdapat 82 laki-laki yang "tidak/belum tamat" atau 97 perempuan yang "tamat" sekolah dasar.

Tabel 5.7.
Proporsi Penduduk Laki-laki dan Penduduk Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2000

Kabupaten	Tdk/Bim Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	Diploma VII	Akademi/ Diploma III	PT/ Di- ploma IV	Jumlah
Pacitan	79	99	110	133	143	133	170	95
Ponorogo	80	106	120	131	126	140	163	98
Trenggalek	82	102	115	130	116	135	149	99
Tulungagung	79	94	104	120	106	109	133	94
Blitar	84	106	107	133	96	124	140	100
Kediri	81	102	115	142	110	126	146	100
Malang	86	102	120	142	115	140	138	102
Lumajang	84	98	115	136	115	127	161	94
Jember	82	100	122	143	137	124	166	98
Banyuwangi	82	102	120	153	149	157	205	100
Bondowoso	82	99	138	158	137	140	199	94
Situbondo	81	95	128	158	151	163	211	95
Probolinggo	85	95	136	185	134	174	189	96
Pasuruan	83	96	128	153	123	130	142	97
Sidoarjo	86	84	100	127	108	127	138	99
Mojokerto	83	94	114	157	125	131	168	100
Jombang	80	95	111	140	118	130	143	98
Nganjuk	79	102	114	144	108	123	143	99
Madiun	75	101	120	138	115	125	136	98
Magetan	71	97	113	129	114	118	136	94
Ngawi	80	103	115	137	110	123	161	97
Bojonegoro	82	103	118	152	143	158	175	99
Tuban	81	105	112	149	125	148	164	97
Lamongan	79	97	105	139	151	177	191	95
Gresik	82	92	105	132	125	127	152	98
Bangkalan	82	97	126	144	112	147	163	91
Sampang	87	109	138	151	136	128	228	96
Pamekasan	81	98	124	164	205	191	225	96
Sumenep	76	100	131	192	227	208	279	91
Kediri*	76	83	110	128	86	105	141	99
Blitar*	80	90	94	119	71	99	127	95
Malang*	80	83	101	118	89	112	133	98
Probolinggo*	78	88	113	140	102	119	144	96
Pasuruan*	60	89	108	126	83	118	123	96
Mojokerto*	77	82	96	119	74	112	145	94
Madiun*	71	73	98	112	72	102	134	91
Surabaya*	84	77	96	123	110	115	131	98
Jawa Timur	82	97	112	135	118	125	145	97

Sumber: Lampiran 1 dan 2 (Karakteristik Penduduk Prop. Jawa) Timur, 2000, diolah.

Keterangan: * = Kota

Namun dilain pihak bila dibandingkan dengan kategori pendidikan yang lebih tinggi, maka kondisi tersebut terjadi justru sebaliknya. Penduduk yang telah menamatkan sekolah SMP hingga perguruan tinggi/diploma 4 lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Hal tersebut tampak dari proporsi sebesar 112 untuk tamat SMP; 135 untuk SMU; 118 untuk diploma 1 atau diploma 2; 125 untuk akademi atau diploma 3; dan 145 untuk lulusan perguruan tinggi atau diploma 4. Hal tersebut bermakna bahwa semakin tinggi pendidikan formal (khususnya di Jawa Timur) maka kesempatan tersebut lebih banyak dimiliki oleh kaum laki-laki dari pada kaum perempuan, terutama pada jenjang SMU; akademi/diploma3; dan perguruan tinggi atau diploma 4.

Berdasarkan data tersebut, maka disparitas gender dalam siswa lulusan Sekolah Dasar diantara wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur relatif tidak mengalami perbedaan yang berarti. Hanya saja untuk Kota Madiun dan Kota Surabaya memiliki perbedaan yang relatif besar, dengan proporsi masing-masing 73 dan 77, atau kondisi ini merupakan karakteristik kota-kota pada umumnya dimana lulusan Sekolah Dasar untuk kaum perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sedangkan untuk wilayah kabupaten proporsi tersebut cukup bervariasi mulai dari yang terendah di Kabupaten Sidoarjo dengan proporsi 84 hingga tertinggi 109 untuk Kabupaten Sampang. Hanya sebagian kabupaten saja yang mempunyai proporsi kelulusan Sekolah Dasar yang lebih besar dari 100. Diantaranya adalah Kabupaten Ponorogo Kabupaten Tuban dengan proporsi masing-masing 106 dan 105.

Namun bila dilihat pada jenjang lulusan SLTP dan selanjutnya, maka kondisi tersebut justru terjadi sebaliknya, yakni pada umumnya di semua wilayah memiliki proporsi di atas 100, yang berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, maka terdapat jumlah kelulusan laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah kelulusan perempuan. Keadaan nyata sekali terlihat di semua kabupaten dan di sebagian besar kota-kota di Jawa Timur.

Untuk jenjang SLTP misalnya, pada semua wilayah kabupaten memiliki proporsi di atas 100. Hal tersebut berarti maka lulusan SLTP dari jenis kelamin laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Hanya saja terdapat beberapa kota yang memiliki proporsi di bawah 100 atau jumlah lulusan perempuan lebih besar daripada laki-laki, yakni pada Kota Blitar (94); Kota Mojokerto (96); Kota Madiun (98); dan Kota Surabaya (96).

Demikian pula pada jenjang SLTA pun terjadi hal serupa. Malah pada jenjang ini para lulusan SLTA pada semua kabupaten dan kota menunjukkan keadaan dimana jumlah laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Bila dibandingkan antara wilayah kabupaten dan kota boleh dikatakan disparitas gender yang terjadi di wilayah kota tidak sebesar yang terjadi di wilayah kabupaten. Di Perkotaan perbedaan atau disparitas gender tersebut berkisar antara proporsi terendah 112 (Kota Madiun) dan tertinggi 140 (Kota Probolinggo). Sedangkan di wilayah kabupaten proporsi tersebut cukup mencolok yakni 120 (Kabupaten Tulungagung) dan tertinggi 192 (Kabupaten Sumenep).

Demikian pula bila disimak pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu Diploma 1 hingga Diploma 4 atau perguruan tinggi, maka kecenderungan seperti di atas jelas semakin memperkuat keadaan dimana wilayah kabupaten mempunyai intensitas perbedaan gender yang cukup mencolok. Apalagi pada jenjang Perguruan Tinggi atau Diploma 4, disana jelas antara wilayah perkotaan dan kabupaten mempunyai perbedaan yang cukup nyata. Di wilayah perkotaan proporsi pendidikan tertinggi yang ditamatkan bagi laki-laki dan perempuan tersebut berkisar antara 123 (Kota Pasuruan) dan tertinggi 145 (Kota Mojokerto). Sedangkan di wilayah kabupaten, proporsi tersebut berkisar antara 133 (Kabupaten Tulungagung) dan tertinggi 279 (Kabupaten Sumenep). Bahkan boleh dikatakan wilayah "*Tapal Kuda*" seperti Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Sumenep, Pamekasan, Sampang memiliki disparitas gender yang cukup mencolok. Di wilayah ini proporsi tersebut mencapai 199 hingga 279.

Pada bagian lain, dari berbagai penelitian telah ditemukan beberapa faktor yang menjadi pemacu sekaligus pemicu kondisi tersebut, diantaranya adalah adanya prasarana dan sarana yang minim dan mutu pasokan siswa SD yang umumnya tidak melalui jenjang TK. Faktor lain yang ditengarai menjadi penyebab kualitas pendidikan di daerah buruk adalah ikhwal peran orang tua dan pengaruh lingkungan sosial. Tiga persoalan pokok yang menjadi penyebab anak rawan *drop out* atau tidak naik kelas adalah *pertama*, kurangnya perhatian atau pengawasan orang tua terhadap kegiatan belajar anak di rumah, *kedua*, figur orangtua yang senantiasa melihat keberhasilan seseorang dari ukuran yang praktis dan pragmatis. Artinya di mata orangtua yang terpenting adalah si anak dapat cepat bekerja dan mencari uang sendiri. *Ketiga*, Kesadaran akan kebutuhan belajar anak. Sedangkan faktor lainnya di luar faktor keluarga adalah masalah lingkungan sosial masyarakat desa, dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa lulusan SLTP banyak yang tidak melanjutkan sekolah tetapi malah bekerja.

Demikian juga dengan faktor internal sekolah meskipun tidak terlalu dominan namun setidaknya turut menjadi pemicu terjadinya hal tersebut di atas dimana hal itu acapkali dapat menyebabkan murid tidak sekolah dan pada akhirnya si anak tidak mau melanjutkan sekolah. Faktor tersebut adalah kerasnya guru atau pengajar dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada murid yang membuat suatu kesalahan atau tidak mengerjakan tugas rumah, terutama hukuman yang bersifat fisik. Adapun faktor internal keluarga juga menjadi salah satu penyebab rendahnya minat anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Kondisi orang tua yang sebagian besar waktunya tersita waktunya untuk mencari nafkah sehingga tidak ada waktu untuk mengetahui serta membantu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh anaknya di sekolah. Disamping itu tidak jarang pula terjadi si orangtua sendiri ternyata adalah orang yang sama sekali tidak pernah mengenal bangku sekolah, sehingga wajar jika mereka tidak mampu mendampingi anak-anaknya ketika mengerjakan PR di rumah.

Sementara itu dari hasil Susenas 2001 bila dirinci menurut wilayah kabupaten/kota maka ketimpangan gender dalam bidang pendidikan untuk penduduk yang tidak/belum bersekolah terjadi pada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan intensitas yang berbeda. Untuk wilayah dengan disparitas gender yang tertinggi terdapat pada Kabupten Sumenep, Sampang, dan Bangkalan dengan ketimpangan antara 14 hingga 17 persen. Sedangkan untuk wilayah terendah terdapat pada Kota Blitar, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya dengan ketimpangan sebesar 3 hingga 4 persen. Atau Secara umum dapat dikatakan bahwa disparitas gender yang terjadi di wilayah perkotaan untuk penduduk yang tidak/belum pernah sekolah relatif lebih rendah dibandingkan yang terjadi di wilayah kabupaten. Lihat Lampiran 5.

Tidak dapat dibantah bahwa persoalan ekonomi ternyata juga mempengaruhi kualitas murid dalam proses pendidikan. Disamping latar belakang pendidikan orangtua rendah, sering pula tekanan ekonomi/kemiskinan dan kewajiban orangtua untuk mencari uang atau bekerja menyebabkan kegiatan belajar si anak menjadi terbengkelai. Sangat dimaklumi bila kondisi seperti di atas ditemukan di beberapa wilayah di Jawa Timur yang kebanyakan para orangtua murid memenuhi kebutuhan ekonomi dengan mengais rejeki di negeri seberang.

Munculnya pandangan di kalangan orangtua tentang fungsi sekolah adalah sangat pragmatis, dalam arti sekolah (dan proses pendidikan pada umumnya) tampaknya hanya dipahami sebagai sarana untuk melatih anak dapat membaca dan menulis tampaknya sulit untuk dibendung. Bagi masyarakat desa memandang sekolah tidak terlalu penting, sebab dalam kenyataan acapkali di lapangan membuktikan hal-hal yang mengarah pada hal tersebut. Adanya kasus pengangguran di kalangan sarjana yang cukup banyak di daerah pedesaan dan di sisi lain justru lebih banyak TKW/TKI yang lebih sukses secara ekonomi meski mereka tidak bersekolah yang terlalu tinggi adalah contoh-contoh kongkrit yang seringkali terinternalisasi di benak masyarakat desa dan diyakini kebenarannya.

Demikian pula dari hasil Susenas 2002 diperoleh temua bahwa kesenjangan pendidikan terutama perempuan yang “tidak/belum tamat SD” dibandingkan laki-laki terjadi pada semua kota/kabupaten di Jawa Timur. Kesenjangan tersebut cukup besar perbedaannya yakni sekitar 10,38 persen. Umumnya kesenjangan tersebut terjadi di wilayah “Tapal Kuda” dan “Mataraman” (bagian Barat Propinsi Jawa Timur).

Wilayah “Tapal Kuda” yang mengalami perbedaan yang cukup besar tersebut terdapat pada Kabupaten Sumenep, Bondowoso dan Situbondo yakni masing-masing sebesar 19,40 persen, 17,64 persen, dan 15,45 persen. Di wilayah “Mataraman” kesenjangan tersebut terdapat pada Kabupaten Ngawi, Ponorogo dan Pacitan masing-masing sebesar 15,04 persen, 13,46 persen dan 12,32 persen. Adapun wilayah perkotaan dan sekitarnya yang terletak di sekitar “Gerbangkertosusila” relatif tidak mengalami perbedaan yang cukup mencolok.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan SD hingga SLTA kesenjangan pendidikan tersebut tidaklah terpaut jauh bahkan sangat tipis sekali. Bahkan di tahun tersebut persentase laki-laki masih lebih rendah dibandingkan perempuan, yakni berkisar antara 0,50 hingga 0,76 persen. Namun persentase laki-laki yang “tidak bersekolah lagi” justru lebih besar daripada persentase perempuan yakni 8,37 persen. Keadaan in banyak terjadi di Kabupaten Sumenep, Bangkalan, Jember, Bondowoso, Situbondo, Ponorogo, Tuban, Magetan, Ngawi yang persentasenya di atas Jawa Timur. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6, 7 dan 8.

5.3.3. Melek Huruf Orang Dewasa

Di sisi lainnya analisis kesenjangan gender untuk bidang pendidikan dapat ditinjau dari kemampuan penduduk dalam “baca tulis” untuk penduduk berusia 10 tahun ke atas. Yang dimaksudkan dengan kemampuan penduduk yang dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan suatu huruf latin maupun huruf

lainnya. Dalam pembahasan disini kemampuan penduduk dalam baca tulis tidak dibedakan antara “huruf latin” dan “huruf lainnya”. Sehingga analisis dalam penelitian hanya membedakan antara penduduk yang “bisa” dan “tidak bisa” baca tulis.

Berdasarkan data pada Tabel 5.8. berikut dapat diketahui bahwa kemampuan baca tulis penduduk Jawa Timur secara umum antara laki-laki adalah sebesar 89,65 persen dibandingkan perempuan 76,81 persen pada tahun 1998. Keadaan ini terus mengalami perbaikan seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin membaik. Hal ini ditandai dengan semakin turunnya angka buta huruf baik laki-laki maupun perempuan pada periode tahun 1999 hingga 2004. Sehingga di tahun-tahun berikutnya angka melek huruf mengalami perbaikan namun masih menunjukkan kesenjangan gender untuk angka melek huruf pada tahun 2002 yakni 90,51 persen untuk laki-laki dan 79,47 untuk perempuan.

Tabel 5. 8.
Angka Buta Huruf dan Angka Melek Huruf Umur 10 Tahun Ke Atas
Berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Timur
Tahun 1998 – 2002

Uraian	1998	1999	2000	2001	2002
Laki - laki					
Angka Buta Huruf (persen)	10,35	10,17	10,00	9,75	9,49
Angka Melek Huruf (persen)	89,65	89,83	90,00	90,25	90,51
Jumlah (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N (000 jiwa)	13.617,43	13.913,37	14.071,63	14.088,70	14.278,45
Perempuan					
Angka Buta Huruf (persen)	23,19	22,86	22,44	21,49	20,53
Angka Melek Huruf (persen)	76,81	77,14	77,56	78,51	79,47
Jumlah (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N (000 jiwa)	14.630,17	14.742,51	14.846,24	148,32	15.046,87
Laki-laki + Perempuan					
Angka Buta Huruf (persen)	17,00	16,69	16,39	15,78	15,16
Angka Melek Huruf (persen)	83,00	83,31	83,61	84,22	84,84
Jumlah (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N (000 jiwa)	28.247,60	28.655,88	28.917,87	28.921,48	29.325,32

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur diolah, Susenas Tahun 1998-2002

Demikian pula bila diperhatikan kesenjangan angka buta huruf (ABH) selama kurun waktu 5 tahun tersebut secara umum terus-menerus mengalami penurunan dari 17,00 persen pada tahun 1998 hingga mencapai 15,16 persen pada tahun 2002. Namun bila diperhatikan berdasarkan jenis kelamin maka ABH untuk perempuan dibandingkan laki-laki selalu lebih tinggi mulai tahun 1998 hingga tahun 2002.

Dengan perbedaan yang cukup lebar tersebut hal ini masih menunjukkan bahwa meskipun perekonomian semakin membaik namun dalam pembangunan pendidikan khususnya bagi kaum perempuan masih mengalami ketertinggalan dari laki-laki. Setidaknya ketimpangan ini semakin memperkuat keyakinan bahwa "nilai" anak laki-laki masih lebih dikedepankan bila dibandingkan anak perempuan khususnya dalam dunia pendidikan.

Secara regional hal ini dapat memperlihatkan bahwa kemampuan baca tulis di kalangan masyarakat Jawa Timur masih terjadi ketimpangan khususnya dalam pemerataan di bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Kemampuan baca tulis penduduk menurut wilayah kabupaten maupun kota pun menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan keadaan pendidikan pada umumnya. Di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa disparitas gender memang terjadi di berbagai aspek pembangunan khususnya bidang pendidikan. Hal ini ditunjukkan juga oleh jumlah laki-laki yang mampu baca tulis lebih tinggi dibandingkan perempuan pada seluruh wilayah kabupaten maupun kota dengan intensitas yang berbeda antar wilayah.

Menurut hasil Susenas 2001 (lihat Tabel 5.9.) nampak bahwa wilayah "*tapal kuda*" merupakan daerah yang memiliki disparitas gender dalam kemampuan baca tulis yang relatif cukup tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Jawa Timur. Daerah yang memiliki disparitas gender yang cukup tinggi dimana jumlah penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis laki-laki lebih banyak adalah Kabupaten Bondowoso (18,87 persen); Situbondo

(18,43 persen); Sumenep (17,91 persen); Jember (16,21 persen); Sampang (15,95 persen); Bangkalan (15,82 persen); Kabupaten Probolinggo (15,48 persen). Adapun tiga wilayah yang terdapat disparitas gender terendah adalah Kabupaten Sidoarjo (2,97 persen); Kota Surabaya (4,26 persen), dan Kota Malang (5,56 persen). Boleh dikatakan secara umum daerah perkotaan, kemampuan baca tulis laki-laki tidak terput jauh dibandingkan dengan kaum perempuan.

Namun dari temuan di lapangan, semakin menguatkan fenomena di atas khususnya yang terjadi di Kabupaten Bondowoso. Dikatakan dalam penelitian Bagong Suyanto (2001:72) selain kemiskinan dan kesadaran orangtua terhadap arti pentingnya sekolah, yang tak kalah merisaukan sebenarnya adalah kecenderungan para orang tua untuk segera mengawinkan anaknya – terutama anak perempuan – untuk segera melepaskan diri dari kewajiban menghidupi anak sehari-harinya. Ditambahkan pula bahwa “*kawin pemutihan*” yakni cara masyarakat menyiasati himbauan pamong agar tidak mengawinkan anak di usia dini merupakan salah satu upaya untuk menikahkan anak secara *sirri*, setelah itu baru meminta pengesahan di KUA atau ke Modin. Dalam hal ini pamong desa akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena si anak telah terlanjur “tidur bersama”, yang pada akhirnya hanya bisa menyetujui saja.

Demikian pula fenomena anak yang ditinggal orangtuanya bekerja tidak hanya terjadi pada keluarga-keluarga yang orangtuanya bekerja sebagai TKW/TKI. Di kalangan keluarga nelayan, pada saat musim penangkapan ikan, biasanya orangtua murid akan bekerja di laut selama beberapa hari, sehingga boleh dikatakan anak yang bersangkutan menjadi “kesepian” dari bimbingan dan arahan orangtuanya. Dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh Bagong, dkk (Bagong S., 2001: 82) di Kabupaten Probolinggo sebagaimana dituturkan oleh salah seorang pamong desa dikatakan bahwa:

Tabel 5.9.
 Prosentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2001
 dan Kemampuan Baca Tulis Tahun 2001

Kabupaten	Jenis Kelamin						Disparitas gender (L - P)	Kabupaten
	Laki-laki			Perempuan				
	Dapat baca tulis huruf			Dapat baca tulis huruf				
	Bisa	Tdk Bisa	Jumlah	Bisa	Tdk Bisa	Jumlah	Bisa (%)	
Pacitan	90,71	9,29	100,00	75,41	24,59	100,00	18,87	Bondowoso
Ponorogo	86,28	13,72	100,00	72,62	27,38	100,00	18,43	Situbondo
Trenggalek	94,55	5,45	100,00	84,95	15,15	100,00	17,91	Sumenep
Tulungagung	93,75	6,25	100,00	84,54	15,46	100,00	16,21	Jember
Blitar	92,17	7,83	100,00	82,26	17,74	100,00	15,95	Sampang
Kediri	94,15	5,85	100,00	82,77	17,23	100,00	15,92	Bangkalan
Malang	93,04	6,96	100,00	81,85	18,35	100,00	15,48	Probolinggo
Lumajang	84,73	15,27	100,00	73,74	26,26	100,00	15,30	Pacitan
Jember	86,00	14,00	100,00	68,79	30,21	100,00	15,02	Pamekasan
Banyuwangi	91,30	8,70	100,00	76,43	23,57	100,00	14,92	Ngawi
Bondowoso	76,66	23,34	100,00	57,79	42,21	100,00	14,87	Banyuwangi
Situbondo	78,49	21,51	100,00	60,06	39,94	100,00	14,67	Tuban
Probolinggo	82,94	17,06	100,00	67,46	32,54	100,00	13,86	Ponorogo
Pasuruan	92,70	7,30	100,00	80,86	19,14	100,00	13,36	Lamongan
Sidoarjo	98,53	1,47	100,00	94,56	5,44	100,00	12,57	Bojonegoro
Mojokerto	93,78	6,22	100,00	83,91	16,09	100,00	12,47	Madiun
Jombang	94,93	5,07	100,00	85,41	14,59	100,00	11,84	Pasuruan
Nganjuk	92,32	7,68	100,00	81,78	18,22	100,00	11,67	Magetan
Madiun	88,06	11,94	100,00	75,59	24,41	100,00	11,39	Malang
Magetan	94,21	5,79	100,00	82,54	17,46	100,00	11,38	Kediri
Ngawi	86,93	13,07	100,00	72,01	27,99	100,00	10,99	Lumajang
Bojonegoro	86,47	13,53	100,00	73,90	26,10	100,00	10,74	Probolinggo*
Tuban	85,92	14,08	100,00	71,25	28,75	100,00	10,54	Nganjuk
Lamongan	90,79	9,21	100,00	77,43	22,57	100,00	9,91	Blitar
Gresik	94,96	5,04	100,00	87,08	12,92	100,00	9,87	Mojokerto
Bangkalan	80,03	19,97	100,00	64,21	35,79	100,00	9,70	Trenggalek
Sampang	66,08	33,92	100,00	50,13	49,87	100,00	9,52	Jombang
Pamekasan	85,33	14,67	100,00	70,31	29,69	100,00	9,21	Tulungagung
Sumenep	82,65	17,35	100,00	64,74	35,26	100,00	7,88	Gresik
Kediri*	98,29	1,71	100,00	91,71	8,29	100,00	7,72	Pasuruan*
Blitar*	97,38	2,62	100,00	91,52	8,48	100,00	6,68	Madiun*
Malang*	97,93	2,07	100,00	92,37	7,63	100,00	6,58	Kediri*
Probolinggo*	91,85	8,35	100,00	80,91	19,09	100,00	6,09	Mojokerto*
Pasuruan*	96,16	3,84	100,00	88,44	11,56	100,00	5,86	Blitar*
Mojokerto*	98,10	1,90	100,00	92,01	7,99	100,00	5,56	Malang*
Madiun*	97,96	2,04	100,00	91,28	8,72	100,00	4,26	Surabaya*
Surabaya*	98,09	1,91	100,00	93,83	6,17	100,00	3,97	Sidoarjo
Jawa Timur	90,11	9,89	100,00	78,57	21,43	100,00	11,54	Jawa Timur

Sumber: Hasil Susenas Jawa Timur, 2001, diolah

Keterangan : * = Kota

“Kalau di daerah pantai, anak-anak kebanyakan jarang bertemu orangtuanya. Apalagi kalau sedang musim ikan. Nelayan biasanya melaut sehari-hari, bisa sampai Jepara, Tuban, atau bahkan Jakarta untuk mencari ikan. Di rumah biasanya anak-anak mereka akhirnya seperti anak yatim atau yatim piatu. Yang mengurus biasanya mbahnya. Tetapi, apa mungkin orang yang sudah tua bisa mengajari cucunya belajar?”

5.3.4. Partisipasi Sekolah

Dalam analisis penelitian ini lebih ditekankan pada aspek penduduk yang “masih bersekolah”, yakni mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal. Sedangkan “tidak bersekolah lagi” yang dimaksudkan disini adalah mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif. Mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak yang tidak melanjutkan ke SD/MI dianggap tidak/belum pernah ber-sekolah (Susenas Jawa Timur 2001: 11).

Untuk mengetahui lebih rinci maka dalam pembahasan disini dipergunakan angka partisipasi sekolah (APS) yakni perbandingan antara jumlah kelompok yang bersekolah dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia sekolah tertentu dikalikan seratus. Disini tidak memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang dijalani, mengingat perhatian utamanya adalah penduduk usia sekolah pada dasarnya harus sekolah. APS dikatakan “baik” bila mendekati atau bahkan mencapai angka seratus, yang berarti setiap anak usia sekolah sedang duduk di bangku sekolah (Analisis Indikator Makro Sosial/Ekonomi Jawa Timur, 2002: 92-93)

Tabel 5.10.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah
SD, SLTP, dan SLTA sederajat
di Jawa Timur Tahun 1998-2002 (%)

Uraian	1998	1999	2000	2001	2002
SD/MI					
Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun)	95,61	95,41	96,14	96,92	96,73
SLTP/MTs					
Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun)	77,75	79,74	80,57	81,59	81,83
SMUSMIKMA					
Angka Partisipasi Sekolah (16-18 tahun)	49,26	50,49	51,04	51,53	51,84

Sumber : Dinas P dan K dan BPS Propinsi Jawa Timur

Keterangan: *) Angka Sementara

5.3.4.1. Partisipasi Sekolah Usia SD (7-12 tahun)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia SD (7-12 tahun) pada tahun 1998 tercatat sebesar 95,61 persen yang berarti untuk setiap 100 anak usia 7-12 tahun terdapat sekitar 96 anak yang masih bersekolah dan sisanya yaitu sekitar 2,75 persen anak usia SD tidak/belum pernah sekolah dan 1,65 persen lainnya tidak bersekolah lagi, yang mungkin dikarenakan *drop out* atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Perkembangannya selama 5 tahun terakhir (1998-2002) menunjukkan adanya kecenderungan semakin meningkat meskipun pada tahun 1999 dan 2002 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Yaitu pada tahun 1999 APS sedikit menurun menjadi 95,41 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,14 persen, tahun 2000 meningkat menjadi 96,14 persen, tahun 2001 meningkat lagi menjadi 96,92 persen dan terakhir pada tahun 2002 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,59 persen sehingga menjadi 96,73 persen. (Lihat Tabel 5.10.)

Apabila diperhatikan perkembangan APS menurut jenis kelamin tampak bahwa perkembangan APS menurut jenis kelamin tampak bahwa perkembangan APS perempuan lebih cepat dibanding APS laki-laki. Sejak tahun 1999 APS perempuan lebih besar dibanding APS laki-laki. Apabila keadaan ini terus berlanjut terus untuk usia di atas SD akan terjadi kesetaraan

tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan bisa jadi tingkat pendidikan perempuan akan lebih tinggi dibanding laki-laki karena perkembangan partisipasi sekolah pada perempuan cenderung lebih cepat dibanding laki-laki. (Lihat Tabel 5.11.)

Tabel 5.11.
Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun Menurut Jenis Kelamin
di Jawa Timur Tahun 1998-2002

Uraian	1998	1999	2000	2001	2002
Laki-laki					
Tidak/belum sekolah (persen)	2,68	3,10	2,73	2,08	1,96
Masih sekolah (persen)	95,74	95,39	95,64	96,78	96,23
Tidak sekolah lagi (persen)	1,58	1,51	1,63	1,14	1,81
Jumlah (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N (000jawa)	2.015.62	1.968.56	1.922.35	1.933.90	1.919.35
Perempuan					
Tidak/belum sekolah (persen)	2,82	3,28	2,03	1,95	1,57
Masih sekolah (persen)	95,47	95,44	96,66	97,06	97,26
Tidak sekolah lagi (persen)	1,71	1,28	1,31	0,99	1,17
Jumlah (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N (000jawa)	1.897.66	1.817.30	1.818.36	1.856.63	1.819.45
Laki-laki + Perempuan					
Tidak/belum sekolah (persen)	2,75	3,19	2,39	2,02	1,77
Masih sekolah (persen)	95,61	95,41	96,14	96,92	96,73
Tidak sekolah lagi (persen)	1,64	1,40	1,47	1,06	1,50
Jumlah (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N (000jawa)	3.913.28	3.785.87	3.740.71	3.790.54	3.738.80

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, Susenas Tahun 1998-2002

APS usia SD untuk kabupaten/kota pada tahun 2002 terdapat 4 kabupaten/kota yang sudah mendekati 100 persen yaitu: Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Blitar dan Kota Mojokerto. Sedangkan APS usia SD yang kurang dari 95 persen sebanyak 5 kabupaten, yaitu: Kabupaten Jember, Situbondo, Sumenep, Pamekasan dan yang terendah adalah Kabupaten Sampang. (Lihat Lampiran 9)

Apabila diperhatikan perkembangan anak usia SD yang tidak/belum pernah sekolah selama 5 tahun terakhir tampak persentasenya cenderung menurun meskipun pada tahun 1999 pernah mengalami peningkatan. Pada

tahun 1998 angka tersebut sebesar 2,75 persen dan meningkat menjadi 3,19 persen pada tahun 1999. Hal ini diduga sebagai akibat krisis ekonomi sehingga terpaksa orang tua harus memunda memasukkan anaknya ke bangku sekolah. Selanjutnya pada tahun 2000 menurun lagi menjadi 2,39 persen, tahun 2001 menurun lagi menjadi 2,02 persen dan terakhir pada tahun 2002 juga terjadi penurunan hingga menjadi 1,07 persen.

Menurut jenis kelamin, pada tahun 1998 dan 1999 persentase anak laki-laki usia SD yang belum/tidak pernah sekolah lebih tinggi dibanding perempuan, tetapi sejak tahun 2000 hingga 2002 yang terjadi adalah sebaliknya, persentase anak laki-laki yang belum/tidak pernah sekolah lebih rendah dibanding pada perempuan. Selanjutnya untuk anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi, tampak bahwa selama tahun 1998-2001 menunjukkan adanya penurunan walaupun sangat kecil. Namun yang perlu diwaspadai ternyata pada tahun 2002 persentase anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 1,07 persen menjadi 1,50 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,43 persen. Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, sebagaimana pada APS maupun anak yang tidak/belum pernah sekolah, sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 keadaan perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki, yaitu yang tidak sekolah lagi untuk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

5.3.4.2. Partisipasi Sekolah Usia SLTP (13-15 tahun)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia SLTP (13-15 tahun) pada tahun 1998 tercatat sebesar 77,75 persen yang berarti untuk setiap 100 anak usia 13-15 tahun terdapat sekitar 78 anak yang masih bersekolah. Sisanya sekitar 1,23 persen tidak/belum pernah sekolah dan 21,02 persen tidak bersekolah lagi yang mungkin dikarenakan memang *drop out* atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

APS usia SLTP selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2002 APS usia SLTP telah mencapai 81,83 persen atau mengalami peningkatan sebesar 4,08 persen dibanding tahun 1998.

Lebih lanjut, apabila diperhatikan APS usia SLTP menurut jenis kelamin tampak bahwa APS laki-laki pada tahun 1998 lebih tinggi dibanding APS perempuan, yaitu 78,76 persen berbanding 76,65 persen atau terjadi kesenjangan sebesar 2,11 persen. Pada tahun 2002 kesenjangan semakin menurun yaitu 81,92 persen untuk APS laki-laki berbanding 81,73 persen untuk APS perempuan atau terjadi perbedaan sekitar 0,19 persen. Berarti selama kurun waktu terakhir terjadi penurunan kesenjangan sekitar 1,92 persen.

Tabel 5.12.
Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun Menurut Jenis Kelamin
di Jawa Timur Tahun 1998-2002

Uraian	1998	1999	2000	2001	2002
Laki-laki					
Tidak/belum sekolah (persen)	1,04	1,03	0,94	0,95	0,99
Masih sekolah (persen)	78,76	80,10	80,51	81,44	81,92
Tidak sekolah lagi (persen)	20,20	18,87	18,55	17,61	17,08
Jumlah (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N (000jwa)	1.106.16	1.043.81	998,97	950,92	907,55
Perempuan					
Tidak/belum sekolah (persen)	1,44	1,20	1,08	0,92	0,88
Masih sekolah (persen)	76,65	79,44	80,63	81,76	81,73
Tidak sekolah lagi (persen)	21,91	19,36	18,30	17,32	17,39
Jumlah (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N (000jwa)	1.000.37	971,81	933,74	870,90	862,54
Laki-laki + Perempuan					
Tidak/belum sekolah (persen)	1,23	1,11	1,05	0,98	0,97
Masih sekolah (persen)	77,75	79,74	80,57	81,59	81,83
Tidak sekolah lagi (persen)	21,02	19,15	18,38	17,43	17,20
Jumlah (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N (000jwa)	2.106.52	2.015.63	1.930.70	1.821.82	1.770.09

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, Susenas Tahun 1998-2002

Jika diperhatikan APS usia SLTP tahun 2002 menurut kabupaten/kota terdapat sebanyak 7 daerah yang persentasenya di atas 95 persen, yaitu: Kabupaten Lamongan, Sidoarjo, Magetan, Kediri, Mojokerto, Madiun dan Blitar. Sedangkan APS usia SLTP yang kurang dari 60 persen sebanyak 3 daerah, yaitu: di Kabupaten Probolinggo, Bangkalan dan yang terendah di Kabupaten Sampang (43,30 persen). Lihat Lampiran 10.

Perkembangan anak usia 13-15 tahun yang tidak/belum pernah sekolah selama periode 5 tahun tersebut tampak persentasenya cenderung mengalami penurunan. Berturut-turut pada tahun 1998 sebesar 1,23 persen selanjutnya menurun menjadi 1,1 persen pada tahun 1999, pada tahun 2000 menurun lagi menjadi 1,05 persen, tahun 2000 menjadi 0,98 persen dan terakhir pada tahun 2002 menjadi 0,97 persen.

Menurut jenis kelamin, pada tahun 1998 dan 2001 persentase anak laki-laki yang belum/tidak pernah sekolah lebih rendah dibanding perempuan, tetapi mulai tahun 2001 yang terjadi adalah kebalikannya, persentase anak laki-laki yang belum/tidak pernah sekolah lebih tinggi dibanding pada perempuan. Lihat Tabel 5.12.

Selanjutnya untuk anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi, selama tahun 1998-2002 menunjukkan pola huruf "U". Namun demikian sebenarnya menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Pada tahun 1998 persentase anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi sebesar 21,02 persen kemudian turun menjadi 17,20 persen pada tahun 2002.

Sementara itu bila diperhatikan menurut jenis kelamin, persentase anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan kesenjangan yang semakin rendah. Secara umum perkembangan angka putus sekolah dalam lima tahun terakhir tampak pola seperti "U" yaitu cenderung semakin menurun selama tahun 1998-2001 dan sedikit meningkat pada tahun 2002.

5.3.4.3. Partisipasi Sekolah Usia SLTA (16-18 tahun)

APS untuk usia SLTA (16-18 tahun) pada tahun 1998 tercatat sebesar 49,26 persen yang berarti untuk setiap 100 anak usia 16-18 tahun terdapat sekitar 49 anak yang masih bersekolah dan sisanya sekitar 2,12 persen tidak/belum pernah sekolah dan 48,62 persen tidak bersekolah lagi yang mungkin dikarenakan memang *drop out* atau sudah tamat SLTP tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SLTA.

Pada Tabel 5.13. APS usia SLTA apabila diperhatikan perkembangannya selama 5 tahun terakhir ini (1998-2002) tampak adanya kecenderungan semakin meningkat yaitu dari 49,26 persen pada tahun 1998 menjadi 51,84 persen atau meningkat sebesar 2,58 persen pada tahun 2002.

Tabel 5.13.
Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin
di Jawa Timur Tahun 1998-2002

Uraian	1998	1999	2000	2001	2002
Laki-laki					
Tidak/belum sekolah (persen)	1,55	1,33	1,12	0,96	0,99
Masih sekolah (persen)	52,03	52,70	53,37	54,04	53,97
Tidak sekolah lagi (persen)	46,42	45,97	45,50	44,99	45,04
Jumlah (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N (000jiwa)	1.012,82	1.080,56	1.033,74	994,78	1.021,17
Perempuan					
Tidak/belum sekolah (persen)	2,71	2,40	2,06	1,72	1,75
Masih sekolah (persen)	46,43	46,61	47,49	48,90	49,55
Tidak sekolah lagi (persen)	50,86	50,98	50,45	49,38	48,70
Jumlah (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N (000jiwa)	997,17	1.052,78	962,95	960,10	951,36
Laki-laki + Perempuan					
Tidak/belum sekolah (persen)	2,12	1,86	1,59	1,34	1,36
Masih sekolah (persen)	49,26	50,49	51,04	51,53	51,84
Tidak sekolah lagi (persen)	48,62	47,65	47,37	47,13	46,80
Jumlah (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N (000jiwa)	2.009,99	2.133,33	1.996,69	1.954,88	1.972,53

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, Susenas Tahun 1998-2002

Bila diperhatikan menurut jenis kelamin keadaannya tidak jauh berbeda dengan APS usia SD dan SLTP yang sudah menunjukkan kecenderungan

tingkat kesenjangan yang semakin menurun walaupun tidak secepat usia SD dan SLTP. Pada tahun 1998 tingkat kesenjangan antara APS laki-laki dan perempuan sebesar 5,6 persen selanjutnya pada tahun 2002 menurun menjadi 4,42.

Apabila APS usia SLTA pada tahun 2002 diperhatikan menurut kabupaten/kota, tampak bahwa daerah yang APS-nya di atas 75 persen sebanyak 6 daerah, yaitu Kabupaten Magetan dan Sidoarjo, Kota Mojokerto, Blitar, Kediri dan Madiun. Sedangkan yang kurang dari 30 persen terdapat pada 3 daerah yakni Kabupaten Probolinggo, Bangkalan dan yang terendah adalah Kabupaten Sampang (12,95 persen). Lihat Lampiran 11.

Melihat perkembangan anak usia 16-18 tahun yang tidak/ belum pernah sekolah selama selama 5 tahun terakhir tampak persentasenya cenderung semakin menurun. Pada tahun 1998 sebesar 2,12 persen selanjutnya pada tahun 2002 menjadi 1,36 persen. Menurut jenis kelamin, persentase anak laki-laki yang belum/tidak pernah sekolah lebih rendah dibanding perempuan selama lima tahun terakhir.

Adapun untuk anak usia SLTA yang tidak bersekolah lagi, tampak bahwa selama tahun 1998-2002 menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, sejak tahun 1998 sampai dengan 2002 ternyata untuk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan dalam hal yang tidak bersekolah lagi.

Sementara itu menurut angka partisipasi sekolah berdasarkan jenis kelamin kesenjangan gender antar wilayah tahun 2001 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.14. Berdasarkan data tersebut angka partisipasi sekolah antar wilayah di Propinsi Jawa Timur secara umum terlihat bahwa penduduk yang berumur 5 tahun ke atas yang "masih bersekolah" laki-laki berjumlah sekitar 22,57 persen, sedangkan kondisi tersebut bagi perempuan berjumlah 20,23. Suatu perbandingan yang secara relatif tidaklah demikian timpang.

Tabel 5.14.
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas dan Partisipasi Sekolah Tahun 2001

Kabupaten	Laki-laki				Perempuan			
	Tidak/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah	Tidak/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
Pacitan	10,34	22,30	67,36	100,00	23,30	17,51	59,19	100,00
Ponorogo	16,69	22,50	60,81	100,00	28,96	21,67	49,37	100,00
Trenggalek	6,55	21,10	70,35	100,00	19,41	19,71	60,88	100,00
Tulungagung	7,85	21,27	70,88	100,00	16,01	18,83	65,16	100,00
Blitar	10,33	22,76	66,91	100,00	17,89	20,93	61,18	100,00
Kediri	9,86	21,93	68,21	100,00	19,98	23,63	56,39	100,00
Malang	10,64	21,77	67,59	100,00	21,86	19,77	58,37	100,00
Lumajang	17,62	18,98	65,40	100,00	27,83	15,05	57,12	100,00
Jember	18,84	20,80	60,36	100,00	32,57	18,50	48,93	100,00
Banyuwangi	11,76	19,63	68,59	100,00	24,57	18,09	57,34	100,00
Bondowoso	19,15	17,86	62,99	100,00	31,82	13,80	54,38	100,00
Situbondo	20,79	17,33	61,88	100,00	34,75	14,89	50,36	100,00
Probolinggo	13,51	18,50	67,99	100,00	27,27	15,10	57,63	100,00
Pasuruan	10,42	19,61	69,97	100,00	21,89	18,19	59,92	100,00
Sidoarjo	3,85	26,64	69,51	100,00	7,74	22,46	69,80	100,00
Mojokerto	10,27	24,27	65,46	100,00	16,92	19,44	63,64	100,00
Jombang	8,03	25,27	66,70	100,00	15,21	24,61	60,18	100,00
Nganjuk	9,87	24,04	66,09	100,00	18,60	22,19	59,21	100,00
Madiun	14,75	20,16	65,09	100,00	24,26	20,99	54,75	100,00
Magetan	8,07	23,28	68,65	100,00	20,77	20,96	58,27	100,00
Ngawi	15,34	23,58	61,08	100,00	28,31	21,82	49,87	100,00
Bojonegoro	13,35	22,69	63,96	100,00	24,85	19,37	55,78	100,00
Tuban	17,52	19,42	63,06	100,00	31,40	18,13	50,47	100,00
Lamongan	14,14	25,05	60,81	100,00	24,43	20,45	55,12	100,00
Gresik	8,47	22,62	68,91	100,00	15,93	20,76	63,31	100,00
Bangkalan	25,60	23,60	50,80	100,00	39,82	19,11	41,07	100,00
Sampang	32,67	23,81	43,52	100,00	48,17	18,84	32,99	100,00
Pamekasan	19,20	22,36	58,44	100,00	32,21	16,73	51,06	100,00
Sumenep	25,03	16,87	58,10	100,00	42,72	15,53	41,75	100,00
Kediri*	5,49	26,76	67,75	100,00	10,91	23,44	65,65	100,00
Blitar*	5,21	24,19	70,60	100,00	8,90	22,98	68,12	100,00
Malang*	6,45	30,51	63,04	100,00	12,56	28,57	58,87	100,00
Probolinggo*	12,16	21,52	66,32	100,00	20,87	18,15	60,98	100,00
Pasuruan*	7,21	25,01	67,78	100,00	14,58	22,90	62,52	100,00
Mojokerto*	4,84	25,30	69,86	100,00	11,26	24,87	63,87	100,00
Madiun*	5,72	26,20	68,08	100,00	11,14	25,88	62,98	100,00
Surabaya*	4,50	27,67	67,83	100,00	9,03	24,64	66,33	100,00
Jumlah	12,54	22,57	64,88	100,00	22,67	20,23	57,10	100,00

Sumber: Hasil Susenas Jawa Timur, 2001

Keterangan : * = Kota

Bila dirinci menurut wilayah kabupaten maupun kota, maka semua perbandingan tersebut menunjukkan keadaan penduduk laki-laki yang masih bersekolah lebih besar dibandingkan penduduk perempuan yang masih bersekolah. Hanya terdapat pengecualian yang terjadi pada Kabupaten Kediri dan Kabupaten Madiun yakni persentase perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Adapun tiga wilayah yang terdapat disparitas gender tertinggi yang terkait dengan partisipasi sekolah yakni Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pacitan.

Namun bila diperhatikan pada kategori "tidak/belum pernah sekolah" maka ketimpangan gender antara penduduk laki-laki dan perempuan pada tingkat provinsi nampak demikian menonjol dengan perbandingan 12,54 persen untuk penduduk laki-laki dan 22,67 persen untuk penduduk perempuan. Kondisi seperti ini menunjukkan jumlah *penduduk perempuan yang tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan formal atau penduduk perempuan yang tamat/belum tamat TK yang tidak melanjutkan ke SD/MI* 10,13 persen lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

Bila dirinci menurut wilayah kabupaten/kota maka ketimpangan gender untuk penduduk yang tidak/belum bersekolah terjadi pada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan intensitas yang berbeda. Untuk wilayah dengan disparitas gender yang tertinggi terdapat pada Kabupten Sumenep, Sampang, dan Bangkalan dengan ketimpangan antara 14 hingga 17 persen. Sedangkan untuk wilayah terendah terdapat pada Kota Blitar, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya dengan ketimpangan sebesar 3 hingga 4 persen. Atau Secara umum dapat dikatakan bahwa disparitas gender yang terjadi di wilayah perkotaan untuk penduduk yang tidak/belum pernah sekolah relatif lebih rendah dibandingkan yang terjadi di wilayah kabupaten.

Dari berbagai penelitian telah diketemukan beberapa faktor yang menjadi pemacu sekaligus pemicu kondisi tersebut, diantaranya adalah adanya prasarana dan sarana yang minim dan mutu pasokan siswa SD yang

umumnya tidak melalui jenjang TK, faktor lain yang ditengarai menjadi penyebab kualitas pendidikan di daerah buruk adalah ikhwal peran orang tua dan pengaruh lingkungan sosial. Tiga persoalan pokok yang menjadi penyebab anak rawan *drop out* atau tidak naik kelas adalah *pertama*, kurangnya perhatian atau pengawasan orang tua terhadap kegiatan belajar anak di rumah, *kedua*, figur orangtua yang senantiasa melihat keberhasilan seseorang dari ukuran yang praktis dan pragmatis. Artinya di mata orangtua yang terpenting adalah si anak dapat cepat bekerja dan mencari uang sendiri. *Ketiga*, Kesadaran akan kebutuhan belajar anak. Sedangkan faktor lainnya di luar faktor keluarga adalah masalah lingkungan sosial masyarakat desa, dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa lulusan SLTP banyak yang tidak melanjutkan sekolah tetapi malah bekerja.

Persoalan ekonomi ternyata juga mempengaruhi kualitas murid dalam proses pendidikan. Disamping latar belakang pendidikan orangtua rendah, sering pula tekanan ekonomi/kemiskinan dan kewajiban orangtua untuk mencari uang atau bekerja menyebabkan kegiatan belajar si anak menjadi terbengkelai. Sangat dimaklumi bila kondisi seperti di atas ditemukan di beberapa wilayah di Jawa Timur yang kebanyakan para orangtua murid memenuhi kebutuhan ekonomi dengan mengais rejeki di negeri seberang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

1. Secara umum terdapat temuan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka terdapat jumlah kelulusan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Keadaan nyata sekali terlihat di semua kabupaten dan di sebagian besar kota-kota di Jawa Timur.
2. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan masyarakat Jawa Timur pada kurun waktu 1998 hingga 2002 sebagian besar adalah "Sekolah Dasar", yakni berkisar antara 33 – 34 persen untuk laki-laki dan 28 – 31 persen untuk perempuan.
3. Kelompok yang "tidak tamat SD" persentase perempuan lebih besar dibandingkan pada jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Meskipun selama kurun waktu lima tahun tersebut keadaan ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun seiring dengan kondisi perekonomian yang semakin membaik.
4. Persentase laki-laki yang melanjutkan pendidikan dari SLTP ke SLTA menunjukkan kecenderungan selalu meningkat, kecuali dari tahun 2001 ke 2002. Sebaliknya persentase perempuan yang melanjutkan pendidikan dari jenjang SLTP ke SLTA justru terjadi penurunan dari tahun 1998 sampai dengan 2002.

5. Wilayah "Tapal Kuda" mengalami kesenjangan gender cukup besar terdapat pada Kabupaten Sumenep, Bondowoso dan Situbondo yakni sebesar 19,40 persen, 17,64 persen, dan 15,45 persen. Wilayah "Mataraman" kesenjangan terdapat pada Kabupaten Ngawi, Ponorogo dan Pacitan masing-masing sebesar 15,04 persen, 13,46 persen dan 12,32 persen. Wilayah di sekitar "Gerbangkertosusila" relatif tidak mengalami perbedaan yang cukup mencolok.

B. Melek Huruf Orang Dewasa

1. Secara umum kesenjangan gender untuk melek huruf orang dewasa laki-laki sebesar 89,65 persen dan perempuan sebesar 76,81 persen. Namun dalam 5 tahun terakhir diikuti oleh penurunan angka buta huruf, sehingga pada tahun 2002 angka melek huruf menjadi 90,51 persen untuk laki-laki dan 79,47 persen untuk perempuan.
2. Wilayah "*tapal kuda*" adalah daerah yang memiliki disparitas gender dalam kemampuan baca tulis yang relatif cukup tinggi, diantaranya adalah Kabupaten Bondowoso (18,87 persen); Situbondo (18,43 persen); Sumenep (17,91 persen); Jember (16,21 persen); Sampang (15,95 persen); Bangkalan (15,82 persen); Kabupaten Probolinggo (15,48 persen). Adapun tiga wilayah yang terdapat disparitas gender terendah adalah Kabupaten Sidoarjo (3,97 persen); Kota Surabaya (4,26 persen), dan Kota Malang (5,56 persen).
3. Secara umum semakin rendahnya ABH pada kelompok umur yang semakin muda (umur 39 tahun ke bawah), antara lain mencerminkan keberhasilan di bidang pendidikan, yaitu sejak adanya SD Inpres pada sekitartahun 1970-an dan Gerakan Wajib Belajar yang dimulai sejak tahun 1984. Bila dilihat ABH penduduk usia 10 tahun, pada tahun 2002 masih terdapat daerah yang mencapai lebih dari 30 persen antara

lain di Kabupaten Situbondo (30,01 persen), Bondowoso (34,26 persen) dan ABH tertinggi adalah di Kabupaten Sampang yaitu 41,46 persen. Untuk ABH cukup rendah yaitu mencapai kurang dari 10 persen ada sebanyak 10 daerah, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Gresik serta seluruh Kota yang ada (7 Kota).

C. Partisipasi sekolah

1. Angka Partisipasi usia SD

- 1.1. Perkembangan APS perempuan lebih cepat daripada APS anak laki-laki dalam kurun 1998-2002.
- 1.2. APS usia SD untuk kabupaten/kota pada tahun 2002 terdapat 4 kabupaten/kota yang sudah mendekati 100 persen yaitu: Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Blitar dan Kota Mojokerto. APS usia SD kurang dari 95 persen sebanyak 5 kabupaten, yaitu: Kabupaten Jember, Situbondo, Sumenep, Pamekasan dan yang terendah adalah Kabupaten Sampang.

2. Angka Partisipasi usia SLTP

- 2.1. Tahun 1998 dan 2001 persentase anak laki-laki yang belum/tidak pernah sekolah lebih rendah dibanding perempuan, tetapi mulai tahun 2001 yang terjadi adalah kebalikannya, persentase laki-laki yang belum/tidak pernah sekolah lebih tinggi dibanding perempuan.
- 2.2. Anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi, selama tahun 1998-2002 menunjukkan pola huruf "U". Namun demikian sebenarnya menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Pada tahun 1998 persentase anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi sebesar 21,02 persen kemudian turun menjadi 17,20 persen pada tahun 2002.
- 2.3. Persentase anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan kesenjangan yang

semakin rendah. Secara umum perkembangan angka putus sekolah dalam lima tahun terakhir tampak pola seperti "U" yaitu cenderung semakin menurun selama tahun 1998-2001 dan sedikit meningkat pada tahun 2002.

3. Angka Partisipasi usia SLTA

3.1. Tingkat kesenjangan gender usia SLTA menunjukkan kecenderungan semakin menurun walaupun tidak secepat usia SD dan SLTP. Pada tahun 1998 tingkat kesenjangan antara APS laki-laki dan perempuan sebesar 5,6 persen selanjutnya pada tahun 2002 menurun menjadi 4,42.

3.2. Untuk usia SLTA yang tidak bersekolah lagi, tampak bahwa selama tahun 1998-2002 menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Sejak tahun 1998 sampai dengan 2002 laki-laki yang tidak bersekolah lagi lebih tinggi dibanding perempuan.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dinyatakan pada bagian sebelumnya maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaku ekonomi baik pemerintah maupun bisnis hendaknya memperhatikan kemampuan pihak perempuan dalam rekrutmen tenaga kerja mengingat kaum perempuan semakin menunjukkan hasil nyata baik pada bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi pada beberapa periode terakhir.
2. Alokasi dana pada bidang pendidikan khususnya di wilayah "*tapal kuda*" hendaknya lebih diperbesar mengingat dari berbagai studi lapangan menunjukkan banyaknya hambatan teknis maupun non-teknis

dalam proses belajar mengajar baik dari pihak orangtua murid maupun dari pihak pengajar/guru itu sendiri.

3. Memperluas pendidikan non-formal di daerah-daerah urban yang banyak didatangi pendatang seperti halnya kota Surabaya. Hal ini dimaksudkan untuk menambah keterampilan para pendatang yang pada umumnya belum mempunyai pengetahuan dan pengalaman untuk bekerja di kota.
4. Upaya praktis baik dari pemerintah maupun pebisnis dalam pemberian bantuan buku, makanan tambahan, sarana pendidikan, dan relawan yang terjun langsung pada wilayah-wilayah "rawan" putus sekolah atau yang berpartisipasi rendah dalam pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2001, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, Tarawang, Jogjakarta.
- Ananta, A., 1993, *Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*, Lembaga Demografi FE-UI, Jakarta.
- Boserup, Ester, 1984, *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Ekonomi*, Terjemahan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Engineer, Asghar Ali, 2003, *Pembebasan Perempuan*, Terjemahan, LKIS, Jogjakarta.
- Fakih, Mansour, 2001, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Masri Singarimbun, 1996, *Penduduk dan Perubahan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mufidah Ch., 2003, *Paradigma Gender*, Bayumedia, Malang
- Lincoln Arsyad, 1993 *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta
- Mosse, Julia Cleves, *Jender dan Pembangunan*, Edisi Terjemahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 2002, *Analisis Indikator Makro Sosial/Ekonomi Jawa Timur (Buku 1 -4)*, Surabaya.
- Sjafi, Achmad, 1999, *Pembangunan Manusia dan Isu Jender: Suatu Pendekatan Tingkat Kesejahteraan*, *Majalah Ekonomi* (Tahun IX no.2), Surabaya.
- Sjafi, Achmad dan Kusreni, Sri, 2003, *Disparitas Gender Dalam Pembangunan Antar Wilayah di Jawa Timur: Studi Deskriptif Ekonomi Demografis Dengan Pendekatan Gender-related Development Index*, Tidak dipublikasikan, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya.
- Soule, George, 1994, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka (Dari Aristoteles Hingga Keynes)*, Edisi Terjemahan, Kanisius, Jogjakarta.

Todaro, MP., 2000, *Economic Development*, Seventh Edition, Addison Wesley Longman Inc., New York.

United Nation Development Programme, 1995, *Human Development Report 1995*, New York, London, Oxford University Press.

_____, 2001, *Indonesia Human Development Report 2001*, New York, London, Oxford University Press.

_____, 2002, *Human Development Report 2002*, New York, London, Oxford University Press.

Kepadatan Penduduk Jawa Timur
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1997 - 2002

Kabupaten / Kota	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk					
		1997	1998	1999	2000	2001	2002
Pacitan	1.342,42	396	398	395	403	405	404
Ponorogo	1.371,78	642	645	648	652	655	614
Trenggalek	1.205,22	544	567	550	554	557	542
Tulungagung	1.046,22	900	906	913	922	929	894
Blitar	1.588,79	685	686	688	690	694	671
Kediri	1.386,05	960	967	975	994	1.010	1.023
Malang	2.979,41	759	763	769	775	781	762
Lumajang	1.790,90	520	522	526	527	530	542
Jember	2.477,68	839	841	850	850	856	890
Banyuwangi	5.782,68	251	251	254	254	255	258
Bondowoso	1.560,10	424	425	432	432	431	444
Situbondo	1.638,81	354	355	366	366	366	371
Probolinggo	1.599,03	577	584	577	577	601	637
Pasuruan	1.150,75	1.029	1.041	1.062	4.062	1.065	1.215
Sidoarjo	634,39	1.836	1.879	1.943	1.997	2.039	2.597
Mojokerto	692,15	1.241	1.252	1.231	1.273	1.283	1.342
Jombang	903,9	1.224	1.233	1.241	1.249	1.256	1.260
Nganjuk	1.224,33	817	820	824	827	830	798
Madiun	1.010,86	643	644	648	648	647	634
Magelan	688,82	979	980	994	988	992	889
Ngawi	1.295,98	653	654	659	662	666	628
Bojonegoro	2.307,06	506	508	510	513	516	509
Tuban	1.839,94	544	547	552	555	558	578
Lamongan	1.669,56	710	712	715	719	725	710
Gresik	1.191,19	772	773	792	803	809	866
Bangkalan	1.259,54	581	583	595	605	614	646
Sampang	1.233,36	574	575	576	580	585	614
Pamekasan	792,3	839	841	848	850	863	892
Sumenep	1.998,54	477	478	480	483	490	497
Kota/City							
Kediri	63,4	3.716	3.727	3.731	3.762	3.769	4.110
Blitar	32,57	3.705	3.718	3.749	3.782	3.800	3.888
Malang	110,06	6.490	6.456	6.540	6.640	6.756	6.968
Probolinggo	56,66	3.178	3.168	3.196	3.202	3.212	3.421
Pasuruan	35,29	4.413	4.436	4.470	4.502	4.528	4.846
Mojokerto	16,46	6.448	6.508	6.563	6.564	6.563	6.709
Madiun	33,23	5.584	5.607	5.587	5.668	5.705	4.895
Surabaya	329,36	7.221	7.271	7.357	7.492	7.549	8.021
Batu	92,78						1.833
Jawa Timur	46.428,57	716	720	725	732	738	753

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur

Keterangan : Tahun 1997-2001 mencakup Kota Batu

Lampiran 2

Angka Buta Huruf¹⁾ Umur 10 Tahun ke Atas di Jawa Timur (%)
Tahun 1998 - 2002

Kabupaten	1998	1999	2000	2001	2002
Pacitan	16,34	17,11	18,08	17,20	16,33
Ponorogo	23,34	21,59	20,67	20,78	2,89
Trenggalek	11,43	11,22	9,93	10,36	10,80
Tulungagung	11,04	13,47	10,67	10,97	11,26
Blitar	13,06	15,66	12,00	12,79	13,59
Kediri	14,07	12,82	11,86	11,56	11,26
Malang	13,18	13,96	13,33	12,77	12,21
Lumajang	24,32	20,57	23,03	21,02	19,02
Jember	23,00	24,58	24,72	22,34	19,96
Banyuwangi	16,82	16,14	16,75	16,17	15,60
Bondowoso	33,66	33,30	32,02	33,14	34,26
Situbondo	36,51	32,40	31,43	31,12	30,81
Probolinggo	26,53	28,87	26,04	25,00	23,97
Pasuruan	16,72	15,13	15,46	13,41	11,37
Sidoarjo	4,57	4,16	3,35	3,48	3,60
Mojokerto	10,86	11,08	12,94	11,21	9,48
Jombang	10,24	10,03	9,76	9,99	10,23
Nganjuk	15,6	13,00	12,25	13,9	13,94
Madiun	17,15	18,23	19,37	18,22	17,07
Magetan	14,91	16,40	11,31	11,77	12,23
Ngawi	20,81	18,14	21,71	20,64	19,56
Bojonegoro	19,15	18,98	19,24	19,91	20,58
Tuban	24,43	22,72	22,74	21,66	20,58
Lamongan	18,72	17,08	16,81	16,07	15,33
Gresik	9,15	7,73	9,93	9,12	8,31
Bangkalan	34,62	32,54	33,78	28,38	22,99
Sampang	39,64	39,19	43,02	42,24	41,46
Pamekasan	26,79	24,07	21,40	22,47	23,54
Sumenep	31,15	30,54	26,14	26,66	27,58
Kota					
Kediri	5,57	6,3	6,03	5,17	4,31
Blitar	7,44	6,89	7,08	5,72	4,36
Malang	6,11	5,11	5,13	4,92	4,71
Probolinggo	15,55	12,47	12,45	13,95	15,45
Pasuruan	9,03	10,8	8,23	7,77	7,31
Mojokerto	6,44	5,84	6,43	5,02	3,61
Madiun	7,62	7,45	5,59	5,55	5,51
Surabaya	4,17	5,66	4,49	4,12	3,76
Jawa Timur	17,00	16,69	16,39	15,77	15,16

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, Susenas 1998 - 2002

Keterangan : *) tidak bisa membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun Keatas
Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Tahun)
Tahun 1998 - 2002

Kabupaten	1998	1999	2000	2001	2002
Pacitan	5,43	5,29	5,53	5,72	5,91
Ponorogo	5,15	5,30	5,66	5,61	5,55
Trenggalek	5,96	5,66	6,48	6,37	6,25
Tulungagung	6,05	6,11	6,46	6,48	6,49
Blitar	5,58	5,73	6,00	6,06	6,11
Kediri	5,87	6,31	6,46	6,49	6,51
Malang	5,80	5,46	6,24	6,27	6,30
Lumajang	4,69	5,16	4,93	5,27	5,60
Jember	4,63	4,43	5,06	5,23	5,39
Banyuwangi	5,20	5,60	5,74	5,79	5,84
Bondowoso	3,96	4,34	4,01	4,04	4,07
Situbondo	4,02	4,35	4,25	4,35	4,45
Probolinggo	4,04	4,08	4,32	4,56	4,80
Pasuruan	4,95	5,34	5,48	5,75	6,01
Sidoarjo	8,50	8,77	8,78	8,92	9,06
Mojokerto	6,18	6,17	6,10	6,31	6,51
Jombang	6,60	6,99	7,13	7,03	6,92
Nganjuk	5,78	6,10	6,46	6,43	6,39
Madiun	5,72	5,56	5,89	6,12	6,34
Magetan	5,93	6,03	7,05	6,97	6,89
Ngawi	5,13	5,29	5,43	5,57	5,70
Bojonegoro	5,15	5,38	5,46	5,44	5,42
Tuban	4,61	4,80	5,15	5,20	5,25
Lamongan	5,17	5,66	5,87	6,06	6,24
Gresik	7,09	7,60	7,22	7,25	7,27
Bangkalan	3,40	3,73	3,78	4,37	4,95
Sempang	2,66	2,46	2,59	2,81	3,02
Pamekasan	4,30	4,58	4,89	5,08	5,26
Sumenep	3,85	3,68	4,04	4,04	4,03
Kota					
Kediri	8,14	8,45	8,49	8,72	8,94
Blitar	7,93	8,17	7,90	8,26	8,61
Malang	8,92	8,60	9,40	9,44	9,48
Probolinggo	6,74	7,14	7,22	7,14	7,05
Pasuruan	6,91	7,07	7,32	7,51	7,69
Mojokerto	8,22	8,33	8,46	8,82	9,17
Madiun	8,82	8,69	9,33	9,37	9,41
Surabaya	9,16	9,02	9,29	9,35	9,41
Jawa Timur	5,82	5,94	6,16	6,31	6,46

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, Susenas 1998 - 2002

Lampiran 4

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Tamat SD
Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Tahun)
Tahun 1998 - 2002

Kabupaten	1998	1999	2000	2001	2002
Pacitan	146407	153485	159191	158628	169409
Ponorogo	192901	195230	203466	202986	210991
Trenggalek	215250	211944	222710	219466	224084
Tutungagung	244506	258690	261136	276316	274848
Blitar	270343	274935	285400	278773	293939
Kediri	352842	365500	363911	368032	365978
Malang	590111	598503	624749	635751	661425
Lumajang	225910	244097	259457	266320	274518
Jember	410868	439292	475943	499013	534737
Banyuwangi	349503	353807	355552	357405	353934
Bondowoso	124918	129335	142678	144674	153770
Situbondo	105403	110947	122232	132763	144913
Probolinggo	226740	232830	236375	241152	254022
Pasuruan	323301	328826	344155	347106	367348
Sidoarjo	256552	266947	290940	302174	303863
Mojokerto	200361	207528	215510	212238	218041
Jombang	226304	233990	246534	246731	256751
Nganjuk	237533	245939	260462	261886	276753
Madiun	182296	181602	177960	176492	175153
Magetan	170388	176493	177935	178968	186650
Ngawi	192140	204983	210214	221310	233415
Bojonegoro	307570	320972	328579	339024	348991
Tuban	248610	269504	287639	303791	325544
Lamongan	281617	281614	289222	279320	272862
Gresik	203946	213638	230123	228566	232275
Bangkalan	129834	142973	163939	173307	203527
Sampang	90109	96578	103448	106991	114533
Pamekasan	150048	152.983	158872	160715	165129
Sumenep	197824	213671	218725	225554	233102
Kota					
Kediri	55432	56067	56564	56663	59322
Blitar	27775	26934	25216	23599	23989
Malang	137688	136834	131434	128362	125866
Probolinggo	31899	33039	34272	35991	35268
Pasuruan	35919	36079	35254	36196	36511
Mojokerto	18450	18899	19325	18762	19382
Madiun	24831	25923	25916	26061	26174
Surabaya	506572	491559	474310	476986	481123
Jawa Timur	7692700	7951170	8218348	8339072	8638140

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, Susenas 1998 - 2002

Prosenlase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas dan Partisipasi Sekolah Tahun 2001

Kabupaten	Laki-laki				Perempuan			
	Tidak/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah	Tidak/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
Pacitan	10,34	22,30	67,36	100,00	23,30	17,51	59,19	100,00
Ponorogo	16,69	22,50	60,81	100,00	28,96	21,67	49,37	100,00
Trenggalek	8,55	21,10	70,35	100,00	19,41	19,71	60,88	100,00
Tulungagung	7,85	21,27	70,88	100,00	16,01	18,83	65,16	100,00
Blitar	10,33	22,76	66,91	100,00	17,89	20,93	61,18	100,00
Kediri	9,86	21,93	68,21	100,00	19,98	23,63	56,39	100,00
Malang	10,64	21,77	67,59	100,00	21,86	19,77	58,37	100,00
Lumajang	17,62	16,98	65,40	100,00	27,83	15,05	57,12	100,00
Jember	18,84	20,80	60,36	100,00	32,57	18,50	48,93	100,00
Banyuwangi	11,78	19,63	68,59	100,00	24,57	18,09	57,34	100,00
Bondowoso	19,15	17,86	62,99	100,00	31,82	13,80	54,38	100,00
Situbondo	20,79	17,33	61,88	100,00	34,75	14,89	50,36	100,00
Probolinggo	13,51	18,50	67,99	100,00	27,27	15,10	57,63	100,00
Pasuruan	10,42	19,61	69,97	100,00	21,89	18,19	59,92	100,00
Sidoarjo	3,85	26,64	69,51	100,00	7,74	22,46	69,80	100,00
Mojokerto	10,27	24,27	65,46	100,00	16,92	19,44	63,64	100,00
Jombang	8,03	25,27	66,70	100,00	15,21	24,61	60,18	100,00
Nganjuk	9,87	24,04	66,09	100,00	18,60	22,19	59,21	100,00
Magelang	14,75	20,16	65,09	100,00	24,26	20,99	54,75	100,00
Magetan	8,07	23,28	68,65	100,00	20,77	20,96	58,27	100,00
Ngawi	15,34	23,58	61,08	100,00	28,31	21,82	49,87	100,00
Bojonegoro	13,35	22,69	63,96	100,00	24,85	19,37	55,78	100,00
Taban	17,52	19,42	63,06	100,00	31,40	18,13	50,47	100,00
Lamongan	14,14	25,05	60,81	100,00	24,43	20,45	55,12	100,00
Gresik	8,47	22,62	68,91	100,00	15,93	20,76	63,31	100,00
Bangsalan	25,60	23,60	50,80	100,00	39,82	19,11	41,07	100,00
Sampang	32,67	23,81	43,52	100,00	48,17	18,84	32,99	100,00
Pamekasan	19,20	22,36	58,44	100,00	32,21	16,73	51,06	100,00
Sumenep	25,03	16,87	58,10	100,00	42,72	15,53	41,75	100,00
Kediri*	5,49	26,76	67,75	100,00	10,91	23,44	65,65	100,00
Blitar*	5,21	24,19	70,60	100,00	8,90	22,98	68,12	100,00
Malang*	6,45	30,51	63,04	100,00	12,56	28,57	58,87	100,00
Probolinggo*	12,16	21,52	66,32	100,00	20,87	18,15	60,98	100,00
Pasuruan*	7,21	25,01	67,78	100,00	14,58	22,90	62,52	100,00
Mojokerto*	4,84	25,30	69,86	100,00	11,26	24,87	63,87	100,00
Magelang*	5,72	26,20	68,08	100,00	11,14	25,88	62,98	100,00
Surabaya*	4,50	27,67	67,83	100,00	9,03	24,64	66,33	100,00
Jumlah	12,54	22,57	64,88	100,00	22,67	20,23	57,10	100,00

Sumber: Hasil Susenas Jawa Timur, 2001

Keterangan: * = Kota

Persentase Penduduk Laki-laki Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan Tahun 2002

Kabupaten	Tdk/Bim Tamal SD	SD	SLTP	SLTA	Diploma I - Univ	Tak Bersekolah lagi	Jumlah
Pacitan	8,04	6,19	5,89	3,00	0,76	76,12	100,00
Ponorogo	10,79	6,53	6,71	3,88	0,43	71,66	100,00
Trenggalek	4,74	6,56	6,10	2,63	0,19	79,77	100,00
Tulungagung	5,00	5,75	5,15	2,28	0,19	81,64	100,00
Blitar	6,84	7,06	5,47	2,85	0,23	77,55	100,00
Kediri	4,14	6,64	4,87	3,88	0,49	79,99	100,00
Malang	6,01	7,27	4,98	3,78	0,74	77,22	100,00
Lumajang	10,63	7,76	4,37	2,26	0,13	74,84	100,00
Jember	13,21	6,62	3,94	2,34	1,05	72,84	100,00
Banyuwangi	8,03	7,21	5,43	3,20	0,37	75,76	100,00
Bondowoso	16,71	6,82	4,32	1,83	0,21	70,10	100,00
Situbondo	17,67	6,15	2,60	1,32	0,00	72,20	100,00
Probolinggo	13,24	7,62	3,43	1,45	0,22	74,04	100,00
Pasuruan	5,75	7,78	4,28	3,31	0,45	78,43	100,00
Sidoarjo	1,28	7,10	6,13	6,66	1,57	77,06	100,00
Mojokerto	4,19	7,91	6,08	3,68	0,24	77,89	100,00
Jombang	4,34	8,00	7,44	3,66	0,96	75,39	100,00
Nganjuk	6,92	6,30	7,46	3,62	0,55	75,16	100,00
Madun	10,12	7,34	6,44	3,99	0,42	71,68	100,00
Magetan	5,44	5,28	5,20	5,20	0,11	78,77	100,00
Ngawi	11,20	7,33	7,15	4,67	0,39	69,26	100,00
Bojonegoro	12,23	6,34	6,27	3,07	0,28	71,81	100,00
Tuban	11,05	7,58	5,04	1,85	0,33	74,15	100,00
Lamongan	8,96	6,72	6,00	5,20	0,86	72,26	100,00
Gresik	5,51	8,03	5,97	3,92	2,41	74,17	100,00
Bangkalan	16,36	11,18	4,02	1,75	0,66	66,03	100,00
Sampang	34,60	12,22	3,16	0,93	0,43	48,67	100,00
Parekasan	14,74	9,09	4,76	3,30	1,04	67,07	100,00
Sumenep	21,21	8,07	4,25	2,68	0,26	63,53	100,00
Kediri*	1,46	5,51	5,40	6,55	1,66	79,42	100,00
Blitar*	1,57	5,57	5,47	6,41	1,26	79,70	100,00
Malang*	1,74	5,35	6,46	5,84	10,32	70,29	100,00
Probolinggo*	8,53	5,72	5,42	5,43	1,02	73,88	100,00
Pasuruan*	3,19	7,09	6,04	6,17	1,26	76,25	100,00
Mojokerto*	1,52	5,91	6,11	6,21	2,86	77,39	100,00
Madun*	1,90	5,62	5,40	7,09	2,01	77,99	100,00
Surabaya*	2,27	4,76	5,19	5,46	4,32	78,00	100,00
Jawa Timur	8,57	7,04	5,30	3,63	1,14	74,32	100,00

Sumber: Hasil Susenas Jawa Timur, 2002

Keterangan: * = Kota

Persentase Penduduk Perempuan Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan Tahun 2002

Kabupaten	Tdk/Slm Tamal SD	SD	SLTP	SLTA	Diploma I - Univ	Tak Bersekolah lagi	Jumlah
Pacitan	20,36	5,41	5,17	2,36	0,09	66,61	100,00
Ponorogo	24,25	6,84	6,75	4,30	0,42	57,44	100,00
Trenggalek	12,73	6,62	4,40	2,99	0,26	73,00	100,00
Tulungagung	12,78	6,22	5,13	3,02	0,57	72,29	100,00
Blitar	15,59	6,24	5,89	3,37	0,41	68,51	100,00
Kediri	14,81	7,39	4,93	3,62	0,40	68,85	100,00
Malang	16,57	7,32	5,22	2,07	0,59	68,23	100,00
Lumajang	21,05	6,33	5,09	1,83	0,26	65,44	100,00
Jember	26,86	6,19	4,45	2,05	1,04	59,41	100,00
Banyuwangi	20,13	5,22	4,78	1,98	0,29	67,60	100,00
Bondowoso	34,35	6,15	2,31	1,40	0,29	55,50	100,00
Situbondo	33,12	4,50	1,35	1,11	0,20	59,72	100,00
Probolinggo	26,58	5,51	2,04	1,96	0,07	63,85	100,00
Pasuruan	14,43	7,60	3,92	2,68	0,49	70,87	100,00
Sidoarjo	4,56	6,74	5,79	5,57	1,15	76,20	100,00
Mojokerto	13,06	6,04	6,04	3,69	0,52	70,64	100,00
Jombang	12,27	6,33	6,13	3,84	0,74	70,69	100,00
Nganjuk	15,97	5,94	6,72	3,87	0,25	67,25	100,00
Madiun	19,96	4,80	6,43	4,86	0,81	63,14	100,00
Magetan	15,96	6,91	4,48	3,49	0,85	68,31	100,00
Ngawi	26,24	5,10	6,29	3,99	0,54	57,84	100,00
Bojonegoro	22,38	5,34	4,73	2,27	0,21	65,08	100,00
Tuban	24,88	6,87	4,75	1,04	0,46	62,00	100,00
Lamongan	21,04	5,48	5,35	3,67	0,68	63,78	100,00
Gresik	13,25	6,75	4,87	4,13	1,39	69,61	100,00
Bangkalan	30,85	9,09	3,61	1,28	0,44	54,73	100,00
Sampang	49,21	9,47	1,39	0,61	0,08	39,23	100,00
Pamekasan	26,93	7,97	2,83	1,87	0,83	59,59	100,00
Sumenep	40,61	5,41	2,89	0,84	2,50	50,03	100,00
Kediri*	6,49	5,01	5,56	5,28	1,06	75,16	100,00
Blitar*	5,28	4,41	4,60	6,63	7,58	78,02	100,00
Malang*	6,54	4,83	6,37	6,68	0,94	68,02	100,00
Probolinggo*	18,20	6,52	4,73	4,03	0,94	65,58	100,00
Pasuruan*	10,19	6,43	4,94	3,99	2,01	72,45	100,00
Mojokerto*	5,67	4,24	6,54	6,17	1,79	75,44	100,00
Madiun*	7,61	4,50	6,00	5,80	1,79	74,30	100,00
Surabaya*	5,57	5,26	4,95	4,44	3,63	76,15	100,00
Jawa Timur	18,95	6,28	4,80	3,05	0,97	65,95	100,00

Sumber: Hasil Susenas Jawa Timur, 2002

Keterangan: * = Kota

Kesenjangan Pendidikan Laki-laki dan Perempuan
Penduduk Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut
Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan Tahun 2002

Kabupaten	Tdk/Bim Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	Diploma III	Tak Bersekolah lagi
Pacitan	-12,32	0,78	0,72	0,84	0,67	9,51
Ponorogo	-13,46	-0,31	-0,04	-0,42	0,01	14,22
Trenggalek	-7,99	-0,06	1,70	-0,36	-0,07	6,77
Tukungagung	-7,78	-0,47	0,02	-0,74	-0,38	9,35
Blitar	-8,75	0,82	-0,42	-0,52	-0,18	9,04
Kediri	-10,67	-0,75	-0,06	0,26	0,09	11,14
Malang	-10,56	-0,05	-0,24	1,71	0,15	8,99
Lumajang	-10,42	1,43	-0,72	0,43	-0,13	9,40
Jember	-13,65	0,43	-0,51	0,29	0,01	13,43
Banyuwangi	-12,10	1,99	0,65	1,22	0,08	8,16
Bondowoso	-17,64	0,67	2,01	0,43	-0,08	14,60
Situbondo	-15,45	1,65	1,25	0,21	-0,20	12,48
Probolinggo	-13,34	2,11	1,39	-0,51	0,15	10,19
Pasuruan	-8,68	0,18	0,36	0,63	-0,04	7,56
Sidoarjo	-3,28	0,36	0,34	1,29	0,42	0,86
Mojokerto	-8,87	1,87	0,04	-0,01	-0,28	7,25
Jombang	-7,93	1,67	1,31	0,02	0,22	4,70
Nganjuk	-9,05	0,36	0,74	-0,25	0,30	7,91
Madiun	-9,84	2,54	0,01	-0,87	-0,39	8,54
Magetan	-10,52	-1,63	0,72	1,71	-0,74	10,46
Ngawi	-15,04	2,23	0,88	0,68	-0,15	11,42
Bojonegoro	-10,15	1,00	1,54	0,80	0,07	6,73
Tuban	-13,83	0,71	0,29	0,81	-0,13	12,15
Lamongan	-12,08	1,24	0,65	1,53	0,18	8,48
Gresik	-7,74	1,28	1,10	-0,21	1,02	4,56
Bangkalan	-14,49	2,09	0,41	0,47	0,22	11,30
Sampang	-14,61	2,75	1,77	0,32	0,35	9,44
Pamekasan	-12,19	1,12	1,93	1,43	0,21	7,49
Sumenep	-19,40	2,66	1,36	1,84	-2,24	13,50
Kediri*	-5,03	0,50	-0,16	1,27	0,60	4,26
Blitar*	-3,71	1,16	0,87	-0,22	-6,32	1,68
Malang*	-4,80	0,52	0,09	-0,82	9,38	2,27
Probolinggo*	-9,67	-0,80	0,69	1,40	0,08	8,30
Pasuruan*	-7,00	0,66	1,10	2,18	-0,75	3,80
Mojokerto*	-4,15	1,67	-0,43	0,04	1,07	1,95
Madiun*	-5,71	1,12	-0,60	1,29	0,22	3,69
Surabaya*	-3,30	-0,50	0,24	1,02	0,69	1,85
Jawa Timur	-10,38	0,76	0,50	0,58	0,17	8,37

Sumber: Hasil Susenas Jawa Timur, 2002

Keterangan : * = Kota

(-) Jarijang pendidikan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan

Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun
Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 1998 - 2002

Kabupaten	1998	1999	2000	2001	2002
Pacitan	97,05	97,37	98,26	98,22	96,70
Ponorogo	98,41	96,68	97,56	97,23	97,48
Trenggalek	96,24	97,40	99,25	97,61	97,92
Tulungagung	99,69	99,64	96,76	99,28	96,84
Blitar	97,52	97,51	97,52	97,62	96,82
Kediri	97,93	98,14	97,01	98,17	97,22
Malang	97,13	95,05	98,82	97,91	97,75
Lumajang	95,99	93,84	93,58	94,99	96,46
Jember	91,99	88,47	93,27	95,68	94,79
Banyuwangi	94,73	96,52	96,93	98,28	97,34
Bondowoso	95,05	94,93	90,50	96,28	95,10
Saubondo	89,15	89,08	89,34	94,04	94,12
Probolinggo	93,62	92,05	90,71	96,32	93,88
Pasuruan	93,14	96,40	92,57	94,78	96,83
Sidoarjo	99,53	99,12	99,70	98,15	99,02
Mojokerto	99,05	98,52	98,14	95,25	99,23
Jombang	98,55	98,02	99,31	98,81	97,66
Nganjuk	98,10	98,68	96,37	98,14	98,05
Magelang	98,41	98,76	97,06	96,69	96,02
Magetan	97,86	99,14	99,67	99,68	98,53
Ngawi	97,87	98,74	98,68	98,61	97,50
Bojonegoro	98,72	98,43	97,67	98,02	98,85
Tuban	96,54	96,60	97,19	98,04	98,71
Lamongan	99,26	99,18	98,77	98,72	97,86
Gresik	98,46	98,49	98,50	98,73	97,86
Bangkalan	88,95	85,01	88,35	91,48	96,32
Sampang	71,50	76,80	84,20	87,46	88,18
Pamekasan	90,67	95,20	92,65	97,06	92,91
Sumenep	94,37	96,62	97,63	94,65	93,52
Kota					
Kediri	99,52	100,00	99,56	99,53	98,21
Blitar	99,52	100,00	98,11	98,54	100,00
Malang	97,47	97,46	99,38	97,17	97,97
Probolinggo	96,40	92,58	95,07	95,47	98,90
Pasuruan	91,78	97,07	95,61	98,34	96,47
Mojokerto	98,35	98,74	99,03	98,44	100,00
Magelang	98,84	99,55	100,00	97,31	98,56
Surabaya	98,14	97,14	99,39	97,77	96,91
Jawa Timur	95,61	95,41	96,14	96,92	96,73

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, Susenas 1998 - 2002

Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun
Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 1998 - 2002

Kabupaten	1998	1999	2000	2001	2002
Pacitan	84,89	83,80	85,97	88,15	88,55
Ponorogo	88,55	92,63	92,58	53,34	93,93
Trenggalek	86,21	82,99	83,47	85,13	85,65
Tulungagung	89,05	89,65	91,17	91,91	92,64
Blitar	83,33	84,79	86,42	86,46	87,60
Kediri	84,00	84,62	85,93	86,66	87,36
Melang	77,51	80,98	82,55	83,77	84,65
Lumajang	67,38	68,05	64,90	65,91	68,73
Jember	57,04	59,22	64,20	67,55	67,90
Banyuwangi	71,95	76,11	79,26	79,74	80,26
Bondowoso	49,41	57,57	63,88	65,60	65,65
Saubondo	63,42	62,53	63,63	63,63	63,85
Probolinggo	54,02	52,08	53,76	56,31	56,79
Pasuruan	63,96	70,77	72,90	73,67	74,62
Sidoarjo	91,45	93,85	94,00	94,45	95,12
Mojokerto	93,95	92,23	89,34	90,02	90,47
Jombang	93,32	92,16	91,55	92,29	92,90
Nganjuk	86,35	88,47	89,33	90,76	91,16
Madiun	87,63	92,63	94,03	95,17	95,58
Magetan	96,28	96,43	95,96	96,68	96,99
Ngawi	84,47	86,63	87,82	88,88	89,01
Bojonegoro	79,71	79,57	80,77	81,11	81,43
Tuban	72,51	75,39	75,04	75,48	75,80
Lamongan	90,90	91,95	93,57	95,50	96,16
Gresik	93,59	92,10	89,90	90,61	91,47
Bangkalan	36,56	47,19	51,79	54,08	55,69
Sampang	38,45	40,67	42,53	42,93	43,30
Pamekasan	50,15	58,37	61,02	61,77	61,60
Sumenep	62,89	67,83	65,34	65,70	66,65
Kota					
Kediri	93,67	94,83	94,25	95,06	96,06
Blitar	91,69	95,60	97,30	98,15	98,91
Malang	87,36	88,50	89,72	93,06	93,62
Probolinggo	76,73	79,58	83,45	86,17	86,48
Pasuruan	82,97	85,94	85,22	85,83	86,54
Mojokerto	92,79	93,68	94,39	94,88	95,72
Madiun	93,30	95,18	97,08	98,01	98,77
Surabaya	90,65	92,63	92,98	93,48	94,22
Jawa Timur	77,75	79,74	80,57	81,59	81,83

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, Susenas 1998 - 2002

Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun
Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 1998 - 2002

Kabupaten	1998	1999	2000	2001	2002
Pacitan	50,93	46,13	45,26	46,05	45,84
Ponorogo	65,27	66,29	64,97	63,91	64,87
Trenggalek	41,05	45,64	51,55	46,67	46,97
Tulungagung	55,20	60,04	63,22	64,26	64,29
Blitar	49,39	51,12	51,65	52,22	52,20
Kediri	49,82	56,53	58,26	59,17	59,22
Malang	48,54	47,81	44,73	41,59	42,76
Lumajang	29,90	33,96	33,14	35,44	35,61
Jember	35,00	34,44	34,32	35,27	35,97
Benyuwangi	40,92	41,83	42,57	42,65	42,79
Bondowoso	22,98	26,98	28,14	32,50	33,12
Situbondo	29,37	33,03	35,34	37,61	38,39
Probolinggo	13,51	23,60	25,93	24,15	25,23
Pasuruan	36,61	34,98	34,44	38,50	39,93
Sidoarjo	69,40	75,42	75,57	77,92	78,69
Mojokerto	53,63	51,82	51,89	51,23	52,03
Jombang	57,63	59,96	58,60	63,69	63,67
Nganjuk	60,33	60,66	58,91	60,96	61,28
Medan	59,97	63,15	65,79	66,26	66,91
Magetan	75,18	74,65	73,81	74,90	75,21
Ngawi	59,48	58,13	59,99	62,64	62,82
Bojonegoro	42,50	41,32	40,61	41,22	40,54
Tuban	33,42	38,25	38,80	36,65	36,43
Lamongan	55,73	58,82	60,60	59,55	60,08
Gresik	58,51	62,66	60,73	61,48	61,22
Bangkalan	19,36	23,79	23,99	26,84	27,47
Sampang	10,98	12,10	12,75	12,84	12,95
Parekasan	32,24	34,52	34,25	35,74	37,00
Sumenep	31,96	36,78	33,89	32,63	34,12
Kota					
Kediri	78,78	77,09	74,66	78,45	78,78
Blitar	81,37	78,66	76,26	78,03	78,11
Malang	66,85	71,48	73,99	71,63	72,02
Probolinggo	57,77	56,10	54,76	58,56	60,43
Pasuruan	52,06	55,46	58,58	60,79	61,30
Mojokerto	77,61	75,20	76,77	76,96	77,32
Medan	84,86	85,32	85,19	86,35	86,70
Surabaya	70,50	71,59	70,27	70,04	70,69
Jawa Timur	49,26	50,49	51,04	51,53	51,84

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, Susenas 1998 - 2002